



INSTITUSI KEUANGAN

Dan

PASAR MODAL

Penulis :

Dr. Annisa Fitri Anggraeni, S.E., M.M., CIISA

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., Asean CPA

Dr. Tri Kunawangsih Purnamaningrum, M.Si., GRCE

Niar Astaginy, S.E., M.Si

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL

Penulis :

Dr. Annisa Fitri Anggraeni, S.E., M.M., CIISA

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., Asean CPA

Dr. Tri Kunawangsih Purnamaningrum, M.Si., GRCE

Niar Astaginy, S.E., M.Si

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL

Penulis :

Dr. Annisa Fitri Anggraeni, S.E., M.M., CIISA
Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M
Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., Asean CPA
Dr. Tri Kunawangsih Purnamaningrum, M.Si., GRCE
Niar Astaginy, S.E., M.Si

ISBN : 978-623-514-469-6

Editor :

Yayan Agusdi

Penyunting :

Inayah Uzma

Desain sampul dan Tata Letak :

Efitra

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Februari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul ***“INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL”*** dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku ini adalah salah satu buku referensi yang membahas peran penting institusi keuangan dalam perekonomian, termasuk bank, pasar modal, dan regulasi yang mengaturnya. Pembaca akan memahami berbagai jenis institusi keuangan, fungsi sistem keuangan, serta bagaimana stabilitas keuangan dijaga melalui regulasi. Selain itu, buku ini menjelaskan pasar modal sebagai sarana investasi, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana, serta mekanisme perdagangan sekuritas. Bab khusus juga membahas peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan penjamin emisi dalam menjaga kepercayaan investor serta efisiensi pasar modal.

Selain dasar-dasar institusi keuangan, buku ini mengulas isu-isu terkini seperti perkembangan fintech, digital banking, serta tantangan perlindungan data dalam sistem keuangan modern. Dampak krisis ekonomi terhadap stabilitas keuangan, regulasi terbaru, serta tren investasi berkelanjutan dan pasar modal hijau juga menjadi sorotan utama. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami dinamika sektor

keuangan serta peluang investasi dengan pendekatan yang komprehensif dan terkini.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bandung, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR INSTITUSI KEUANGAN.....	1
A. DEFINISI DAN FUNGSI INSTITUSI KEUANGAN.....	1
B. JENIS-JENIS INSTITUSI KEUANGAN	4
C. PERAN INSTITUSI KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN	12
D. SISTEM KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN	13
E. REGULASI DAN PENGAWASAN INSTITUSI KEUANGAN	15
BAB 2 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN	19
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI BANK.....	19
B. JENIS-JENIS BANK : BANK SENTRAL, BANK KOMERSIAL, DAN	
BANK SYARIAH	25
C. SISTEM PERBANKAN DAN OPERASIONAL BANK.....	35
D. MANAJEMEN RESIKO DALAM PERBANKAN	40
E. REGULASI DAN PENGAWASAN BANK	46
BAB 3 PASAR MODAL DAN INSTRUMENNYA	54
A. PENGERTIAN PASAR MODAL DAN FUNGSI NYA.....	54
B. JENIS-JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DI PASAR MODAL	61
C. PROSES PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SEKURITAS	74

D.	ANALISIS INVESTASI DI PASAR MODAL	78
E.	REGULASI PASAR MODAL DAN PERLINDUNGAN INVESTOR	81
BAB 4 LEMBAGA DAN MEKANISME PASAR MODAL		85
A.	LEMBAGA-LEMBAGA PASAR MODAL: OJK, BEI DAN	
	PENJAMIN EMISI	85
B.	MEKANISME PERDAGANGAN SEKURITAS DI PASAR MODAL	95
C.	PENAWARAN UMUM (IPO) DAN PROSES PEMBUKAAN	
	SAHAM	96
D.	PERAN RATING AGENSI DAN PENGARUHNYA PADA PASAR	
	MODAL	101
E.	STRUKTUR PASAR MODAL DAN KLASIFIKASI INSTRUMEN	
	INVESTASI	103
BAB 5 ISU TERKINI DALAM INSTITUSI		105
KEUANGAN DAN PASAR MODAL		105
A.	PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM INSTITUSI KEUANGAN	
	(FINTECH DAN DIGITAL MARKETING)	105
B.	ISU KEAMANAN DAN PERLIDUNGAN DATA DALAM SISTEM	
	KEUANGAN	114
C.	DAMPAK KRISIS EKONOMI PADA INSTITUSI KEUANGAN DAN	
	PASAR MODAL	115
D.	REGULASI DAN KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN	

KEUANGAN DAN PASAR MODAL.....	124
E. PERAN INVESTASI BERKELANJUTAN DAN PASAR MODAL.....	
HIJAU.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BIOGRAFI PENULIS	141

BAB 1

PENGANTAR INSTITUSI KEUANGAN

A. DEFINISI DAN FUNGSI INSTITUSI KEUANGAN

Institusi keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi modern. Peran institusi keuangan tidak hanya sebagai perantara dalam pengelolaan dana, tetapi juga sebagai pilar utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas definisi institusi keuangan, fungsi utamanya, serta pentingnya institusi keuangan dalam ekosistem ekonomi.

1.1 Definisi Institusi Keuangan

Institusi keuangan adalah organisasi atau lembaga yang bergerak dalam menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, perusahaan, atau pemerintah. Layanan yang diberikan meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, investasi, hingga pengelolaan risiko. Institusi keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana (seperti penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (seperti peminjam). Berikut ini contoh institusi keuangan meliputi:

- a. Bank Komersial: Menyediakan layanan simpanan, kredit, dan pembayaran.
- b. Perusahaan Asuransi: Memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu.
- c. Koperasi Kredit: Memberikan layanan keuangan berbasis komunitas.

d. Pasar Modal: Memfasilitasi perdagangan saham dan obligasi.

1.2 Fungsi Utama Institusi Keuangan

Institusi keuangan memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan. Berikut adalah pembahasan rinci setiap fungsi:

1.2.1 Penghimpunan Dana

Institusi keuangan bertindak sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini dapat berupa tabungan, deposito, premi asuransi, atau kontribusi lainnya. Dengan adanya institusi keuangan, individu dan organisasi dapat menyimpan uang mereka dengan aman dan memperoleh imbal hasil.

1.2.2 Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk pembiayaan, seperti kredit usaha, pinjaman pribadi, atau investasi di sektor produktif. Penyaluran dana ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal kepada pihak yang membutuhkan.

1.2.3 Fasilitator Transaksi Keuangan

Institusi keuangan menyediakan layanan untuk mempermudah transaksi keuangan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan konversi mata uang. Layanan ini mendukung kelancaran perdagangan dan aktivitas ekonomi.

1.2.4 Manajemen Risiko

Institusi keuangan membantu individu dan perusahaan mengelola risiko melalui produk seperti asuransi dan lindung nilai (hedging). Produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat ketidakpastian, seperti bencana alam atau fluktuasi harga pasar.

1.2.5 Penciptaan Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat. Institusi keuangan menyediakan likuiditas melalui produk seperti rekening giro, pinjaman, dan kartu kredit, sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

1.2.6 Stabilitas Ekonomi

Dengan mengatur arus dana, institusi keuangan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang melibatkan bank sentral, misalnya, dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mencegah ketidakstabilan ekonomi.

1.2.7 Pemberian Layanan Konsultasi Keuangan

Banyak institusi keuangan menyediakan layanan konsultasi untuk membantu nasabah dalam perencanaan keuangan, investasi, dan pengelolaan bisnis. Layanan ini memungkinkan individu dan perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola aset mereka.

1.2.8 Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan

Institusi keuangan membantu meningkatkan efisiensi pasar dengan mengurangi biaya transaksi dan mengalokasikan

sumber daya ke sektor-sektor yang paling membutuhkan. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Institusi keuangan memainkan peran vital dalam mendukung fungsi ekonomi modern. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana, fasilitasi transaksi, manajemen risiko, dan stabilisasi ekonomi, institusi keuangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam mengenai fungsi-fungsi ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam dunia keuangan atau memahami dinamika perekonomian.

B. JENIS-JENIS INSTITUSI KEUANGAN

Institusi keuangan memiliki beragam jenis yang masing-masing memainkan peran khusus dalam ekosistem ekonomi. Setiap jenis institusi memiliki karakteristik unik dan menyediakan layanan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Dalam bab ini, kita akan mengkategorikan institusi keuangan dan membahas peran masing-masing jenis dalam mendukung perekonomian.

2.1 Kategori Institusi Keuangan

Secara umum, institusi keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Institusi Keuangan Bank: Lembaga yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme perbankan.
- b. Institusi Keuangan Non-Bank: Lembaga yang menyediakan jasa keuangan di luar fungsi utama bank.

2.2 Institusi Keuangan Bank

Institusi keuangan bank memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana (debitur) dan pihak yang memiliki dana (kreditur). Dalam konteks Indonesia, sistem perbankan terdiri dari berbagai jenis bank yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai berbagai jenis institusi keuangan bank beserta fungsi dan contoh-contohnya.

a. Bank Sentral

Fungsi Utama:

- Mengatur kebijakan moneter, yang bertujuan untuk mengontrol inflasi dan mendukung stabilitas ekonomi.
- Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dan mengelola cadangan devisa negara.
- Mengawasi sistem keuangan agar berjalan dengan efisien dan aman.
- Sebagai lender of last resort yang dapat memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial yang mengalami kesulitan likuiditas.

- Menerbitkan uang dan mengatur peredaran uang dalam perekonomian.

Contoh:

- Bank Indonesia (BI): Sebagai bank sentral Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan suku bunga acuan (BI Rate) dan mengelola kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan.
- Federal Reserve (AS), European Central Bank (ECB): Contoh bank sentral lainnya di negara maju.

b. Bank Komersial

Fungsi Utama:

- Menyediakan layanan perbankan yang meliputi tabungan, deposito, pinjaman, dan fasilitas transaksi pembayaran.
- Menerima simpanan dari nasabah, yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
- Memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, atau perusahaan untuk membiayai kegiatan konsumsi, investasi, dan operasional.
- Menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya, seperti kartu kredit, transfer uang, dan layanan perbankan elektronik.
- Berperan dalam perekonomian dengan menyalurkan kredit untuk mendukung kegiatan investasi dan konsumsi.

Contoh:

- Bank Mandiri: Salah satu bank komersial terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan, mulai dari tabungan hingga pembiayaan untuk sektor UMKM.
 - Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA): Bank-bank komersial besar yang memiliki jangkauan luas dan memberikan berbagai produk perbankan kepada nasabah individu dan perusahaan.
 - JPMorgan Chase (AS), HSBC (Inggris): Contoh bank komersial besar di luar negeri yang beroperasi di berbagai negara.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fungsi Utama:

- Memberikan kredit kepada sektor mikro dan kecil, serta masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank komersial besar.
- Menyediakan layanan perbankan sederhana yang lebih mudah diakses oleh kalangan masyarakat bawah atau daerah terpencil.
- Menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan skala kecil.
- Berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor ekonomi lokal.
- Menyalurkan kredit yang bersifat produktif untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Contoh:

- BPR Daerah: Banyak BPR yang didirikan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta dengan fokus untuk melayani sektor usaha mikro dan kecil di wilayah tertentu.
- BPR Dana Karya (contoh fiktif): Sebuah BPR yang beroperasi di wilayah pedesaan dan memberikan pinjaman kepada petani dan pelaku usaha mikro.

d. Bank Syariah

Fungsi Utama:

- Menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharamkan riba (bunga) dan investasi pada bisnis yang dianggap haram.
- Memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan).
- Menyediakan produk simpanan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan wadiah (simpanan amanat) dan deposito mudharabah (deposito berbasis bagi hasil).
- Berperan dalam mengembangkan perekonomian berbasis nilai-nilai moral dan etika Islam.

Contoh:

- Bank Syariah Indonesia (BSI): Merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

- Bank Muamalat Indonesia: Salah satu bank syariah pertama di Indonesia.

e. Bank Pembiayaan

Fungsi Utama:

- Fokus pada penyediaan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu, seperti pembiayaan perumahan, kendaraan, atau pembiayaan untuk proyek infrastruktur.
- Menyediakan pinjaman atau fasilitas pembiayaan lainnya dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan jangka panjang nasabah.
- Pembiayaan yang diberikan dapat berbentuk pinjaman konsumtif (misalnya kredit rumah atau mobil) atau pembiayaan investasi (misalnya pembiayaan untuk usaha atau proyek-proyek infrastruktur).

Contoh:

- Bank BTN (Bank Tabungan Negara): Fokus pada pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat.
- Bank Mandiri Taspen: Fokus pada pembiayaan pensiun dan pembiayaan sosial lainnya.

f. Bank Pembangunan

Fungsi Utama:

- Bank jenis ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi proyek pembangunan, baik infrastruktur, perumahan, maupun sektor produktif lainnya.

- Biasanya bank pembangunan memiliki mandat untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional atau daerah.
- Memfasilitasi pembiayaan untuk sektor publik dan proyek yang berhubungan dengan pembangunan sosial-ekonomi.

Contoh:

- Bank Indonesia Infrastruktur: Bank ini bisa berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia.
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): Meskipun bukan bank lokal, AIIB memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur di negara-negara Asia.

2.3 Institusi Keuangan Non-Bank

Institusi ini tidak memiliki fungsi menerima simpanan secara langsung, tetapi menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Contoh institusi ini meliputi:

a. Perusahaan Asuransi

Fungsi utama untuk melindungi nasabah dari risiko finansial melalui produk asuransi. Contoh: Prudential, Allianz.

b. Perusahaan Pembiayaan (Leasing)

Fungsi utama untuk memberikan pembiayaan untuk pembelian barang seperti kendaraan dan alat berat. Contoh: Adira Finance, FIF Group.

c. Dana Pensiun

Fungsi utama untuk mengelola dana pensiun untuk memastikan kesejahteraan di masa tua. Contoh: Taspen, DPLK dari bank komersial.

d. Pasar Modal

Fungsi utama untuk memfasilitasi perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Contoh: Bursa Efek Indonesia (BEI).

e. Koperasi Kredit

Fungsi utama untuk memberikan layanan keuangan berbasis komunitas dengan prinsip gotong-royong. Contoh: Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Jenis-jenis institusi keuangan memainkan peran yang saling melengkapi dalam mendukung perekonomian. Institusi keuangan bank berfokus pada layanan tradisional seperti simpanan dan pinjaman, sementara institusi keuangan non-bank menawarkan solusi keuangan yang lebih spesifik. Dengan memahami berbagai jenis institusi keuangan, kita dapat memanfaatkan layanan mereka secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

C. PERAN INSTITUSI KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN

3.1 Peran Utama Institusi Keuangan

Institusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penciptaan nilai ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas secara rinci peran institusi keuangan dalam perekonomian.

3.1.1 Penyeimbang Arus Dana

Institusi keuangan membantu menyeimbangkan arus dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang memiliki defisit. Mekanisme ini memastikan bahwa dana yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan secara produktif oleh sektor-sektor yang membutuhkannya.

3.1.2 Pengelolaan Risiko Ekonomi

Melalui produk-produk seperti asuransi dan lindung nilai, institusi keuangan membantu masyarakat dan perusahaan mengelola risiko. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi perekonomian dari guncangan eksternal.

3.1.3 Mendorong Stabilitas Moneter

Bank sentral sebagai bagian dari institusi keuangan memainkan peran kunci dalam mengatur kebijakan moneter, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Stabilitas moneter ini menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.1.4 Memfasilitasi Perdagangan dan Investasi

Institusi keuangan menyediakan layanan yang mempermudah transaksi perdagangan dan investasi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini mencakup transfer dana, pembiayaan ekspor-impor, dan penyediaan informasi pasar.

3.2 Dampak Positif Keuangan

- **Peningkatan Inklusi Keuangan:** Institusi keuangan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan keuangan untuk mengakses simpanan, kredit, dan asuransi.
- **Efisiensi Ekonomi:** Dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat alokasi sumber daya, institusi keuangan meningkatkan efisiensi perekonomian.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Banyak proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh institusi keuangan, seperti jalan tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan.

Peran institusi keuangan dalam perekonomian tidak dapat diabaikan. Mereka tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal.

D. SISTEM KEUANGAN DAN STABILITAS KEUANGAN

Sistem keuangan merupakan fondasi utama bagi perekonomian suatu negara. Dalam bab ini, kita akan membahas elemen-elemen utama

sistem keuangan, pentingnya stabilitas keuangan, serta bagaimana institusi keuangan berkontribusi dalam menjaga kestabilan tersebut.

4.1 Komponen Sitem Keuangan

Sistem keuangan terdiri dari tiga komponen utama:

4.1.1 Pasar Keuangan

Pasar di mana instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan. Pasar keuangan memungkinkan pengalihan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan modal.

4.2.2 Lembaga Keuangan

Termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang bertugas menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat dan organisasi.

4.2.3 Infrastruktur Keuangan

Meliputi sistem pembayaran, kliring, dan penyelesaian transaksi yang memastikan kelancaran operasional pasar keuangan.

4.2 Pentingnya Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan mampu berfungsi secara efektif, bahkan dalam kondisi tekanan atau ketidakpastian. Stabilitas ini penting untuk:

- Mencegah krisis ekonomi yang dapat berdampak luas.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

4.3 Peran Institusi Keuangan Dalam Stabilitas Keuangan

Peran Institusi Keuangan dalam Stabilitas Keuangan

4.3.1 Pengelolaan Risiko Sistemik

Institusi keuangan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan, seperti risiko kredit dan likuiditas.

4.3.2 Mendukung Kebijakan Moneter

Institusi keuangan bekerja sama dengan bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

4.3.3 Menyediakan Likuiditas

Dalam situasi darurat, institusi keuangan dapat menyediakan likuiditas untuk mencegah kegagalan pasar.

Sistem keuangan yang stabil adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami peran elemen-elemen utama sistem keuangan dan pentingnya stabilitas, kita dapat melihat betapa krusialnya kontribusi institusi keuangan dalam menjaga keberlanjutan perekonomian global.

E. REGULASI DAN PENGAWASAN INSTITUSI KEUANGAN

Sistem keuangan merupakan fondasi utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui koordinasi antara institusi keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, sistem ini menciptakan kerangka yang memungkinkan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi. Dalam bab ini,

kita akan membahas elemen-elemen kunci dari sistem keuangan, pentingnya stabilitas keuangan, serta risiko yang dapat memengaruhi kestabilan tersebut.

Regulasi dan pengawasan institusi keuangan merupakan elemen penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Tanpa regulasi yang memadai, risiko penyalahgunaan dana, kerugian besar, dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat. Dalam bab ini, kita akan membahas tujuan regulasi, lembaga pengawas keuangan, serta kerangka regulasi yang diterapkan di berbagai institusi keuangan.

5.1 Tujuan Regulasi Institusi Keuangan

Regulasi institusi keuangan bertujuan untuk:

- a. Melindungi Konsumen: Memastikan bahwa hak dan kepentingan nasabah atau pemegang polis terlindungi.
- b. Menjamin Stabilitas Keuangan: Mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian.
- c. Mendorong Efisiensi Pasar: Menciptakan persaingan sehat dan efisiensi dalam pasar keuangan.
- d. Mencegah Tindakan Ilegal: Mengawasi aktivitas untuk menghindari praktik-praktik seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

5.2 Lembaga Pengawas Keuangan

Lembaga pengawas keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan institusi keuangan beroperasi sesuai dengan regulasi. Contoh lembaga pengawas di Indonesia meliputi:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal.
- b. Bank Indonesia (BI): Bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem pembayaran.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Memberikan perlindungan simpanan nasabah dan menangani bank gagal.

5.3 Kerangka Regulasi Institusi Keuangan

Kerangka regulasi mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Perizinan: Proses yang harus ditempuh untuk mendirikan institusi keuangan.
- b. Standar Operasional: Aturan terkait pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan tingkat kecukupan modal.
- c. Audit dan Pengawasan: Proses pemeriksaan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- d. Sanksi: Konsekuensi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran regulasi.

5.4 Tantangan Dalam Regulasi Dan Pengawasan

Regulasi institusi keuangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

- a. Inovasi Teknologi: Perkembangan teknologi seperti fintech memunculkan kebutuhan regulasi baru.

- b. Globalisasi Keuangan: Integrasi pasar global mempersulit pengawasan lintas negara.
- c. Ketidakseimbangan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya di lembaga pengawas untuk mengelola kompleksitas sistem keuangan modern.

Regulasi dan pengawasan institusi keuangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Dengan kerangka regulasi yang efektif dan pengawasan yang ketat, risiko keuangan dapat diminimalkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

BAB 2

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI BANK

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Secara umum, bank dapat didefinisikan sebagai institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya. Bank juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan. Keberadaan bank menjadi elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai pengelola dan penggerak roda keuangan masyarakat.

Fungsi utama bank dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan lainnya. Dalam menghimpun dana, bank menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan giro kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari produk-produk ini akan dikelola dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Di sisi lain, penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan kepada individu maupun badan usaha yang membutuhkan modal untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Selain fungsi utama, bank juga memiliki fungsi tambahan sebagai lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Layanan tersebut meliputi transfer uang, penukaran valuta asing, penerbitan kartu kredit, serta layanan pembayaran seperti pembayaran listrik, air, dan telepon. Bank juga menjadi salah satu pelaku utama dalam pengembangan teknologi keuangan, seperti mobile banking dan internet banking, yang mempermudah transaksi keuangan masyarakat di era digital. Kemajuan teknologi ini menjadikan peran bank semakin penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang serba cepat dan efisien.

Bank dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis, seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral, seperti Bank Indonesia, bertugas menjaga stabilitas moneter, mengatur peredaran uang, serta mengawasi sistem perbankan. Bank umum adalah jenis bank yang melayani masyarakat secara luas, baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun pemberian kredit. Sementara itu, bank perkreditan rakyat (BPR) lebih berfokus pada layanan keuangan untuk usaha kecil dan menengah di daerah tertentu.

Selain itu, bank juga memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan, yaitu memastikan akses ke layanan keuangan tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan adanya bank, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Program-program keuangan inklusif yang didukung oleh bank telah membantu banyak masyarakat memperoleh pembiayaan usaha mikro maupun tabungan pendidikan.

Dari sisi ekonomi, bank berfungsi sebagai motor penggerak sirkulasi uang dalam perekonomian. Bank menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang melalui kebijakan suku bunga dan pemberian kredit. Dengan adanya sistem perbankan yang stabil, masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bank juga berperan sebagai lembaga yang mendukung aktivitas ekspor dan impor melalui penyediaan layanan seperti letter of credit.

Dalam hal keamanan, bank menjadi tempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan uang. Sistem keamanan perbankan yang terus diperbarui, seperti penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor, memberikan rasa aman kepada nasabah. Selain itu, adanya pengawasan dari lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bank beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab.

Bank juga memiliki peran sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program ini mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Dengan cara ini, bank tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai lembaga yang terhubung dengan berbagai sektor, bank juga berperan dalam memperkuat sistem keuangan global. Bank bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung transaksi lintas negara, mendorong investasi asing, dan mengatasi krisis keuangan. Dengan keterlibatan dalam sistem keuangan global, bank turut mendukung stabilitas ekonomi dunia.

Secara keseluruhan, bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan fungsinya sebagai pengelola keuangan, penyedia layanan, dan pendukung inklusi keuangan, bank menjadi pilar utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Peran ini menjadikan bank sebagai institusi yang tidak hanya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain fungsi utama yang telah disebutkan, bank juga berperan sebagai pengelola risiko keuangan, baik bagi individu maupun perusahaan. Melalui produk seperti asuransi, lindung nilai (hedging), dan layanan investasi, bank membantu nasabah meminimalkan dampak risiko keuangan akibat fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, atau faktor-faktor ekonomi lainnya. Dengan adanya manajemen risiko yang ditawarkan oleh bank, pelaku usaha dapat merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Bank juga berperan sebagai katalisator inovasi dalam dunia keuangan. Di era digital, bank menjadi penggerak utama transformasi ekonomi berbasis teknologi melalui adopsi financial technology

(fintech). Contohnya, layanan digital banking, pembayaran elektronik, hingga platform pinjaman peer-to-peer yang dikembangkan oleh bank membantu mempercepat arus transaksi keuangan. Transformasi ini memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan aman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Selain itu, bank memainkan peran strategis dalam pembangunan infrastruktur. Bank sering kali menjadi sumber pendanaan utama bagi proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, hingga fasilitas umum lainnya. Dengan menyalurkan kredit dalam jumlah besar kepada proyek-proyek tersebut, bank membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di bidang perdagangan internasional, bank juga memegang peran penting. Mereka menyediakan fasilitas pembiayaan perdagangan (trade finance) untuk mendukung kegiatan ekspor-impor. Salah satu contoh fasilitas tersebut adalah penerbitan *letter of credit* (L/C), yang menjamin pembayaran antar pihak dalam transaksi perdagangan global. Dengan dukungan bank, perusahaan-perusahaan lokal dapat lebih kompetitif dalam bersaing di pasar internasional.

Bank juga menjadi bagian integral dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui instrumen seperti suku bunga, rasio cadangan wajib (reserve requirement), dan operasi pasar terbuka, bank sentral bekerja sama dengan bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini

bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, mengontrol inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran bank dalam sistem pembayaran juga tidak kalah penting. Bank menyediakan infrastruktur pembayaran yang mendukung berbagai transaksi, baik tunai maupun non-tunai. Sistem pembayaran elektronik, seperti Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional, memungkinkan transfer uang dalam jumlah besar dilakukan dengan cepat dan aman. Selain itu, inovasi dalam sistem pembayaran seperti e-wallet dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Dalam konteks edukasi keuangan, bank juga berkontribusi melalui program literasi keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, pengelolaan keuangan pribadi, serta pentingnya menabung dan berinvestasi. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Bank turut mendukung pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang inklusif. Banyak bank yang menyediakan produk keuangan khusus untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang dikelola oleh perempuan. Hal ini membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian sekaligus mendorong kesetaraan gender di sektor bisnis.

B. JENIS-JENIS BANK : BANK SENTRAL, BANK KOMERSIAL, DAN BANK SYARIAH

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara atau wilayah. Secara umum, tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Bank sentral memiliki otoritas untuk mencetak uang, mengatur suku bunga, dan mengawasi sistem perbankan. Di Indonesia, bank sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia (BI), sedangkan di banyak negara lain dikenal sebagai Federal Reserve (AS), European Central Bank (ECB), atau Bank of England (Inggris).

Salah satu fungsi utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga, yang sering dikaitkan dengan pengendalian inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target inflasi, bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka. Dengan mengubah tingkat suku bunga, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan permintaan agregat dalam perekonomian.

Selain itu, bank sentral juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap bank-bank komersial dan lembaga keuangan lainnya, serta memastikan bahwa mereka beroperasi secara sehat dan sesuai dengan regulasi. Bank sentral juga dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir (*lender of last resort*) untuk bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas. Langkah ini bertujuan mencegah krisis keuangan yang lebih luas akibat kegagalan institusi keuangan tertentu.

Bank sentral juga memiliki peran penting dalam mengelola cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Melalui intervensi di pasar valuta asing, bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar untuk mencegah fluktuasi yang berlebihan. Stabilitas nilai tukar penting untuk mendukung perdagangan internasional dan investasi asing, serta menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang suatu negara.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral sering kali didasarkan pada data ekonomi yang mencakup tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya. Oleh karena itu, bank sentral membutuhkan analisis yang mendalam dan penggunaan model ekonomi yang kompleks untuk mengambil keputusan. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi menjadi penting agar pasar dan masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil.

Bank sentral juga memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui berbagai instrumen moneter. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan giro wajib minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial. Dengan mengatur persentase GWM, bank sentral dapat memengaruhi likuiditas di sektor perbankan, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah kredit yang tersedia untuk masyarakat.

Selain tugas utama tersebut, bank sentral juga sering kali dilibatkan dalam upaya pemulihan ekonomi, terutama dalam situasi krisis. Misalnya, selama krisis ekonomi global, banyak bank sentral di dunia yang menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dilakukan dengan membeli aset keuangan dalam jumlah besar untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan suku bunga jangka panjang.

Independensi bank sentral merupakan salah satu prinsip yang mendasari efektivitasnya. Independensi ini memungkinkan bank sentral untuk mengambil keputusan yang tidak terpengaruh oleh tekanan politik jangka pendek. Namun, independensi tersebut juga disertai dengan akuntabilitas, di mana bank sentral harus memberikan laporan berkala tentang kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap perekonomian.

Bank sentral juga memiliki peran dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung inovasi di sektor keuangan. Dalam era

digital, banyak bank sentral yang mulai mengadopsi teknologi untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman. Beberapa di antaranya bahkan sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan dan meningkatnya popularitas aset kripto.

Secara keseluruhan, bank sentral memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Melalui berbagai kebijakan dan instrumen yang dimilikinya, bank sentral berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan jangka panjang. Keberhasilan bank sentral sangat bergantung pada profesionalisme, transparansi, dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

2. Bank Komersial

Bank komersial adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Bank ini memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan likuiditas, mendukung kegiatan usaha, dan menjaga stabilitas moneter. Sebagai lembaga yang diatur oleh pemerintah melalui otoritas keuangan, bank komersial beroperasi dengan mematuhi aturan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan menjaga kestabilan sistem perbankan.

Fungsi utama bank komersial meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit usaha, maupun pembiayaan lainnya. Proses ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal kepada individu maupun perusahaan untuk mengembangkan usaha, membeli rumah, atau memenuhi kebutuhan lain.

Selain itu, bank komersial juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penerbitan kartu kredit, dan layanan valuta asing. Bank ini memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah melalui internet banking, mobile banking, dan ATM. Layanan digital ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Bank komersial beroperasi dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan, yang umumnya berasal dari selisih bunga (*spread*) antara bunga yang dibayarkan kepada penabung dan bunga yang dikenakan pada debitur. Selain itu, bank juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan yang dikenakan kepada nasabah, seperti biaya administrasi, pengelolaan rekening, dan transaksi.

Di sisi lain, bank komersial juga bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan keuangan. Mereka harus mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko

operasional. Untuk itu, bank wajib menjaga kecukupan modal dan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Hal ini dilakukan agar bank tetap mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai institusi yang terintegrasi dengan perekonomian global, bank komersial juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Mereka menyediakan fasilitas pembiayaan perdagangan, seperti letter of credit (L/C) dan bank garansi, yang mendukung ekspor dan impor barang serta jasa. Dengan demikian, bank membantu memperlancar transaksi antarnegara dan memperkuat hubungan ekonomi internasional.

Bank komersial dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan konsep bagi hasil. Kedua jenis bank ini melayani berbagai segmen masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Di Indonesia, bank komersial diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK bertugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan untuk melindungi nasabah, sementara BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Keduanya bekerja sama untuk memastikan sistem perbankan berjalan dengan sehat dan stabil.

Bank komersial juga menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Untuk tetap kompetitif, banyak bank yang berinvestasi dalam teknologi finansial (fintech), inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, bank juga terus memperkuat strategi untuk menarik nasabah baru, seperti dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif dan program loyalitas.

Dengan perannya yang begitu signifikan, bank komersial menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian modern. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung aktivitas individu, perusahaan, hingga pemerintah. Perkembangan dan stabilitas bank komersial secara langsung berdampak pada kesehatan ekonomi suatu negara.

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Prinsip utama dalam operasional bank syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah), kerjasama (musyarakah), jual beli (murabahah), dan sewa-menyewa (ijarah) dalam memberikan layanan keuangan kepada

nasabah. Dengan demikian, seluruh produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi syarat-syarat syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Salah satu perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah cara memperoleh keuntungan. Dalam bank konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga yang dikenakan kepada nasabah. Sebaliknya, bank syariah memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang halal, seperti margin pada transaksi jual beli, pembagian keuntungan pada akad bagi hasil, dan imbalan atas jasa yang diberikan. Hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi di bank syariah bebas dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariah.

Produk utama bank syariah meliputi pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna. Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan dalam akad musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama menyertakan modal untuk suatu usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disertakan.

Selain itu, bank syariah juga menyediakan produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro syariah. Tabungan dan deposito syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau wadiah (titipan), di mana bank hanya boleh menggunakan dana nasabah

dengan izin, serta hasil keuntungannya dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati. Giro syariah biasanya berbasis akad wadiah atau mudharabah, yang memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menarik dana sewaktu-waktu.

Dalam hal pengelolaan dana, bank syariah sangat berhati-hati dalam memilih jenis investasi dan bisnis yang dibiayai. Bank syariah hanya akan membiayai proyek atau usaha yang halal menurut syariah, seperti perdagangan, manufaktur, dan properti. Sektor-sektor yang dilarang seperti minuman keras, perjudian, atau industri yang merusak lingkungan tidak akan mendapat pembiayaan. Dengan demikian, bank syariah turut berkontribusi pada perekonomian yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai Islam.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPS adalah lembaga independen yang bertugas memberikan nasihat dan mengawasi penerapan syariah dalam operasional bank. Setiap produk atau layanan baru yang akan diluncurkan oleh bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari DPS untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Bank syariah juga memiliki peran sosial yang signifikan melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dana ini biasanya dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim,

atau untuk pembangunan fasilitas umum. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks global, bank syariah telah berkembang pesat, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Namun, popularitas bank syariah juga meningkat di negara-negara non-Muslim, karena dianggap lebih stabil dan etis, terutama setelah krisis keuangan global. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam keuangan memiliki relevansi universal.

Di Indonesia sendiri, bank syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak digabungnya tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia, dengan layanan yang mencakup berbagai kebutuhan keuangan masyarakat, baik individu maupun korporasi. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan keuangan syariah melalui regulasi dan dukungan kebijakan.

Secara keseluruhan, bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang kompetitif, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, bank syariah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan

layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa berkah dan maslahat.

C. SISTEM PERBANKAN DAN OPERASIONAL BANK

Sistem perbankan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu negara yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dan menyediakan berbagai layanan keuangan. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam) untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan rekening giro, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sistem perbankan juga berfungsi menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan likuiditas dan penyediaan akses keuangan.

Operasional bank mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk menjalankan fungsi utama bank, seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan penyediaan jasa-jasa keuangan lainnya. Aktivitas penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk perbankan seperti tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) maupun perusahaan besar. Bank juga berfungsi

sebagai penyedia layanan transaksi, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penyimpanan dokumen berharga.

Sebagai lembaga yang beroperasi dalam lingkungan yang diatur secara ketat, bank harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur operasional perbankan untuk memastikan stabilitas keuangan, keamanan dana nasabah, dan transparansi operasional. Regulasi ini mencakup kebijakan moneter, pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan pengawasan ketat terhadap likuiditas bank.

Sistem perbankan modern kini semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Digitalisasi dalam perbankan memungkinkan kemudahan akses layanan melalui internet banking, mobile banking, dan dompet elektronik. Bank terus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan otomatisasi proses operasional, yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Dalam operasionalnya, bank memiliki berbagai unit kerja yang berfungsi untuk mendukung keberlanjutan aktivitas bisnisnya. Unit front office, seperti teller dan customer service, berinteraksi langsung dengan nasabah untuk memberikan pelayanan. Unit middle office bertanggung jawab dalam manajemen risiko, analisis kredit, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, unit back office

menangani fungsi administratif, seperti pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan sistem teknologi informasi.

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam operasional bank untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Risiko-risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas bank. Bank menggunakan berbagai metode, seperti analisis kredit yang ketat, diversifikasi portofolio, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi anomali transaksi, guna memitigasi risiko ini.

Bank juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan, yaitu upaya untuk memberikan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Program-program seperti pembukaan rekening tanpa biaya, pengembangan agen bank, dan edukasi keuangan menjadi langkah penting dalam mewujudkan inklusi keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Perkembangan sistem perbankan juga menghadirkan tantangan baru, seperti ancaman siber dan kebutuhan akan keamanan data. Bank harus terus memperkuat sistem keamanan teknologi informasi untuk melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan digital. Selain itu, bank juga harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain fungsi komersial, bank juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Melalui

program corporate social responsibility (CSR), bank mendukung inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini mencerminkan komitmen bank terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan peran yang kompleks dan strategis, sistem perbankan menjadi tulang punggung ekonomi modern. Kolaborasi antara bank, regulator, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui inovasi, pengelolaan risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi, bank dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem perbankan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam skala global, bank menjadi bagian dari sistem keuangan internasional yang saling terhubung melalui berbagai transaksi lintas negara, seperti pembayaran internasional, pembiayaan perdagangan, dan investasi asing. Di era globalisasi ini, bank memainkan peran penting dalam mempercepat aliran modal internasional, mendukung perdagangan global, dan membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

Salah satu aspek penting dalam sistem perbankan adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank didasarkan pada analisis yang mendalam untuk meminimalkan risiko. Regulasi seperti

kecukupan modal minimum (Capital Adequacy Ratio) dan pengelolaan likuiditas membantu bank tetap stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Bank juga diwajibkan untuk memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan penarikan dana nasabah.

Bank sentral, sebagai pengendali utama sistem perbankan, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Bank sentral mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan cadangan wajib minimum untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan ini berdampak langsung pada operasional bank, terutama dalam menentukan suku bunga kredit dan tabungan yang kompetitif bagi nasabah.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan, sistem perbankan juga mulai mengadopsi konsep perbankan hijau atau *green banking*. Bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan pembiayaan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, bank dapat memberikan prioritas pembiayaan kepada proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim.

Bank syariah, sebagai bagian dari sistem perbankan, menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan konsep bunga, tetapi menggantinya dengan skema bagi hasil atau jual beli. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan. Bank syariah juga

menghindari pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian dan produksi alkohol.

Keberlanjutan operasional bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci. Bank harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada pemegang saham, nasabah, dan regulator. Kepercayaan ini juga diperkuat dengan adanya jaminan keamanan dana nasabah, seperti program penjaminan simpanan yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia.

Selain itu, bank memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan jangka panjang. Proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik, membutuhkan investasi besar yang sering kali didukung oleh kredit perbankan. Bank bertindak sebagai mitra pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan dana yang diperlukan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

D. MANAJEMEN RESIKO DALAM PERBANKAN

Manajemen risiko dalam perbankan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasionalnya. Perbankan memiliki peran penting sebagai perantara

keuangan yang mengelola dana dari masyarakat, sehingga bank harus mampu memitigasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan operasional mereka. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah melindungi bank dari potensi kerugian, meningkatkan nilai perusahaan, dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu risiko utama dalam perbankan adalah **risiko kredit**, yaitu risiko kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Risiko ini muncul ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang ternyata tidak mampu atau tidak mau membayar kembali. Untuk mengelola risiko kredit, bank melakukan analisis kredit yang mendalam, termasuk evaluasi kemampuan finansial debitur, riwayat kredit, dan prospek usaha. Selain itu, bank juga menerapkan diversifikasi portofolio kredit untuk meminimalkan konsentrasi risiko pada satu sektor atau kelompok tertentu.

Selain risiko kredit, terdapat pula **risiko pasar**, yaitu risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Dalam mengelola risiko pasar, bank menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti derivatif dan hedging untuk melindungi nilai aset mereka. Pengelolaan risiko pasar juga melibatkan pemantauan ketat terhadap fluktuasi pasar serta penerapan batasan eksposur risiko.

Risiko operasional adalah risiko lain yang sering dihadapi oleh perbankan, yang mencakup kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem teknologi informasi,

atau kejadian eksternal seperti bencana alam. Untuk memitigasi risiko ini, bank mengadopsi sistem pengendalian internal yang kuat, melatih karyawan secara berkala, serta mengimplementasikan teknologi yang andal dan aman. Selain itu, bank juga biasanya memiliki rencana pemulihan darurat (disaster recovery plan) untuk memastikan operasional tetap berjalan dalam situasi krisis.

Risiko likuiditas juga menjadi perhatian utama, yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Risiko ini dapat terjadi jika bank tidak memiliki cukup aset likuid untuk menutupi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Bank mengelola risiko likuiditas dengan menjaga cadangan likuiditas yang memadai, mengelola struktur jatuh tempo aset dan liabilitas, serta membangun hubungan yang baik dengan lembaga keuangan lain untuk akses pendanaan darurat.

Dalam konteks manajemen risiko, **kerangka regulasi** juga memainkan peran penting. Otoritas jasa keuangan (OJK) di Indonesia, misalnya, telah menetapkan berbagai aturan seperti penerapan Basel III untuk memastikan bank memiliki kecukupan modal yang memadai dalam menghadapi risiko. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat stabilitas keuangan bank, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Bank juga harus menerapkan **manajemen risiko strategis**, yaitu risiko yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Risiko ini bisa mencakup ekspansi ke pasar baru, peluncuran produk baru, atau perubahan dalam model bisnis. Untuk

mengelola risiko strategis, bank harus memiliki proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, serta mempertimbangkan berbagai skenario dan dampaknya terhadap bisnis.

Penerapan teknologi digital dalam layanan perbankan juga membawa risiko baru, yaitu **risiko siber**. Risiko ini melibatkan ancaman keamanan data, serangan peretasan, dan pencurian identitas nasabah. Untuk mengatasinya, bank menginvestasikan sumber daya dalam sistem keamanan siber, enkripsi data, serta peningkatan kesadaran karyawan dan nasabah terhadap ancaman siber. Audit dan pengujian sistem secara berkala juga dilakukan untuk memastikan keamanan jaringan bank.

Keberhasilan manajemen risiko dalam perbankan sangat tergantung pada **budaya risiko** yang diterapkan oleh seluruh organisasi. Budaya risiko mencerminkan komitmen dari pimpinan hingga staf terhadap pentingnya pengelolaan risiko yang efektif. Bank harus memiliki kebijakan risiko yang jelas, pelatihan yang terus-menerus, serta komunikasi yang terbuka terkait risiko di semua level organisasi.

Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam industri perbankan, penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya melindungi bank dari potensi kerugian tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Bank yang mampu mengelola risiko dengan baik akan lebih dipercaya oleh nasabah dan mampu beradaptasi terhadap perubahan di pasar global. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Manajemen risiko dalam perbankan juga mencakup **risiko reputasi**, yaitu risiko kerugian yang timbul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Risiko ini dapat terjadi karena skandal keuangan, pelanggaran hukum, atau pelayanan yang buruk kepada nasabah. Untuk mengelola risiko reputasi, bank harus menjaga integritas, transparansi, dan konsistensi dalam semua aktivitasnya. Strategi komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, terutama dalam situasi krisis.

Bank juga menghadapi **risiko hukum dan kepatuhan** yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau ketidakpatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Risiko ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan pembatasan operasional. Oleh karena itu, bank harus memiliki tim kepatuhan yang bertugas memastikan semua aktivitas bank sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pelaporan secara berkala kepada otoritas terkait dan audit internal menjadi elemen penting dalam mitigasi risiko ini.

Dalam era globalisasi, bank yang beroperasi di pasar internasional juga menghadapi **risiko negara** atau risiko politik. Risiko ini mencakup potensi kerugian akibat perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau konflik di negara tempat bank beroperasi. Untuk mengelola risiko ini, bank harus melakukan analisis geopolitik yang mendalam sebelum memasuki pasar baru dan terus memantau perkembangan di negara tersebut. Diversifikasi

geografis juga menjadi salah satu strategi untuk mengurangi dampak risiko negara.

Pentingnya integrasi teknologi dalam operasional perbankan juga menghadirkan **risiko teknologi** yang lebih luas. Risiko ini mencakup kerusakan infrastruktur teknologi, kesalahan dalam implementasi teknologi baru, atau kegagalan sistem yang mengganggu layanan kepada nasabah. Untuk memitigasi risiko ini, bank harus melakukan investasi dalam pemeliharaan teknologi secara berkala, melakukan pengujian sistem sebelum peluncuran, dan memiliki tim IT yang kompeten untuk menangani masalah teknis.

Manajemen risiko yang efektif juga membutuhkan **pengukuran risiko yang akurat**. Bank menggunakan berbagai indikator dan model matematis untuk mengukur tingkat risiko, seperti Value at Risk (VaR), analisis sensitivitas, dan stress testing. Alat-alat ini membantu bank dalam memprediksi potensi kerugian dan mengambil langkah preventif sebelum risiko menjadi kenyataan. Analisis data yang komprehensif juga diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil berbasis fakta.

Selain itu, bank harus memiliki **sistem pelaporan risiko** yang transparan dan real-time. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk segera mengetahui eksposur risiko di berbagai lini bisnis. Dengan adanya pelaporan yang akurat, bank dapat merespons risiko dengan cepat dan efektif. Sistem pelaporan juga menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dengan regulator dan pemangku

kepentingan tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko.

Dalam konteks manajemen risiko, bank juga harus membangun **kemitraan strategis** dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan lain, penyedia teknologi, atau perusahaan asuransi. Kemitraan ini membantu bank untuk mengalihkan atau berbagi risiko tertentu melalui kontrak asuransi, kerja sama teknologi, atau konsorsium keuangan. Langkah ini juga memperkuat daya tahan bank terhadap gangguan besar di pasar.

Manajemen risiko tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga harus bersifat **proaktif dan inovatif**. Bank yang unggul dalam manajemen risiko seringkali menggunakan risiko sebagai peluang untuk menciptakan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, dengan memanfaatkan analitik data besar, bank dapat mengidentifikasi segmen pasar yang kurang terlayani dan merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka sambil memitigasi risiko yang terkait.

E. REGULASI DAN PENGAWASAN BANK

Regulasi dan pengawasan bank adalah dua elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Regulasi bank mengacu pada seperangkat aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pengawas untuk mengatur operasi

bank. Aturan ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek operasional bank, termasuk tata kelola, manajemen risiko, kecukupan modal, serta transparansi keuangan. Regulasi ini sangat penting karena sektor perbankan berperan besar dalam perekonomian, baik dalam menyediakan fasilitas pembayaran, kredit, maupun pengelolaan dana masyarakat.

Pengawasan bank adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa bank menjalankan operasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK berfungsi untuk mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang sehat. Sedangkan Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem pembayaran, termasuk melalui pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi.

Regulasi yang ada dalam sektor perbankan juga mencakup berbagai kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Salah satunya adalah regulasi tentang kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR), yang mengharuskan bank untuk memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi kerugian akibat kredit bermasalah atau resiko lainnya. Regulasi ini memastikan bahwa bank dapat bertahan dalam situasi yang tidak terduga dan melindungi simpanan nasabah.

Selain itu, regulasi juga mencakup persyaratan mengenai likuiditas, di mana bank harus memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah Liquidity Coverage Ratio (LCR), yang memastikan bank memiliki likuiditas yang cukup dalam jangka pendek untuk mengatasi tekanan pasar. Regulasi ini membantu mencegah bank mengalami kesulitan likuiditas yang dapat berdampak pada sistem perbankan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan utama dari regulasi dan pengawasan bank adalah untuk melindungi nasabah. Dalam hal ini, ada kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dana nasabah, termasuk jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan nasabah di bank hingga jumlah tertentu, yang memberikan rasa aman kepada nasabah dan mendorong mereka untuk menempatkan dananya di bank.

Pengawasan terhadap bank juga meliputi audit dan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pihak regulator untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menjalankan manajemen risiko yang efektif. Pengawasan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi lebih besar. Pemeriksaan ini sering melibatkan evaluasi terhadap kebijakan kredit bank, pengelolaan risiko pasar, serta sistem operasional yang ada.

Salah satu bagian penting dalam pengawasan adalah evaluasi terhadap praktik pengelolaan risiko bank. Risiko yang dihadapi oleh

bank sangat beragam, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko likuiditas. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan bank mencakup ketentuan tentang pengelolaan risiko yang baik dan kebijakan untuk mencegah terjadinya kerugian besar yang dapat mengguncang kestabilan sistem keuangan.

Selain itu, pengawasan bank juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap anti pencucian uang (APU) dan pendanaan terorisme (PT) (AML-CFT). Bank diwajibkan untuk memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah transaksi yang mencurigakan. Ini penting untuk mencegah sektor perbankan digunakan sebagai saluran untuk kegiatan ilegal yang dapat merusak integritas dan reputasi industri perbankan.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor perbankan, penting bagi regulator untuk memastikan bahwa bank melakukan inovasi dengan cara yang sehat dan terkontrol. Hal ini termasuk regulasi terhadap teknologi perbankan, seperti penggunaan teknologi finansial (fintech), yang semakin berkembang. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi dan kemudahan, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan keamanan data dan perlindungan konsumen. Regulasi harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi, namun tetap ketat dalam memastikan bahwa inovasi tersebut tidak merugikan nasabah atau stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, regulasi dan pengawasan bank adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis keuangan. Dengan regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat,

sektor perbankan dapat berfungsi dengan optimal, mendukung perekonomian, serta memberikan layanan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat. Regulasi yang terus berkembang juga menjadi respons terhadap dinamika perubahan pasar dan inovasi teknologi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sektor perbankan dapat beradaptasi dengan tantangan baru sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk lebih mendalami aspek regulasi dan pengawasan bank, penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran lembaga pengawas dalam mengatasi potensi risiko sistemik. Risiko sistemik adalah risiko yang dapat menyebabkan kerusakan besar dalam sistem keuangan jika satu atau lebih lembaga keuangan gagal atau mengalami krisis. Oleh karena itu, pengawasan bank tidak hanya berfokus pada masing-masing bank secara individu, tetapi juga pada potensi dampaknya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Regulasi yang tepat dan pengawasan yang hati-hati dapat memitigasi kemungkinan risiko sistemik yang dapat mengguncang ekonomi.

Selain pengawasan terhadap risiko, salah satu aspek penting dalam regulasi adalah transparansi dan keterbukaan informasi yang dimiliki oleh bank. Bank diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan secara teratur kepada regulator dan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat mengenai kesehatan finansial bank. Regulasi yang mengharuskan laporan keuangan yang transparan juga berperan dalam mencegah praktik manipulasi dan memastikan

bahwa pemangku kepentingan, termasuk investor dan nasabah, dapat membuat keputusan yang informasional dan berbasis data.

Regulasi juga mencakup peraturan terkait tata kelola bank. Tata kelola yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen bank mendukung keberlanjutan dan kepentingan nasabah. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi pemisahan fungsi antara manajemen dan pengawasan, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan kewajiban bank terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, peraturan yang mengatur tentang kewajiban bank untuk memiliki dewan komisaris yang independen bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan bank dan nasabah.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, regulasi dan pengawasan bank juga harus memperhatikan standar-standar internasional yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga global, seperti Bank for International Settlements (BIS). Salah satu kerangka regulasi internasional yang paling dikenal adalah Basel III, yang memberikan pedoman tentang kecukupan modal, likuiditas, dan pengelolaan risiko untuk bank di seluruh dunia. Indonesia, melalui OJK dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk mengimplementasikan standar-standar ini guna memastikan bahwa sistem perbankan Indonesia dapat bersaing secara global tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan domestik.

Pengawasan bank juga melibatkan tindakan korektif yang diambil oleh regulator ketika suatu bank ditemukan tidak mematuhi regulasi atau menunjukkan indikasi masalah finansial. Salah satu langkah korektif yang sering dilakukan adalah penegakan sanksi, yang bisa berupa denda, pembatasan operasi, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi bank yang gagal memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan dari penegakan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, regulasi yang terkait dengan pengelolaan risiko kredit juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pengawasan bank. Dalam hal ini, bank diwajibkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat dalam pemberian kredit, untuk memastikan bahwa hanya peminjam yang memiliki kapasitas dan niat baik yang diberi pinjaman. Pengawasan terhadap kualitas portofolio kredit ini penting untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa berisiko terhadap keberlanjutan operasional bank.

Regulasi juga memperhatikan aspek keberagaman produk perbankan yang ditawarkan oleh bank. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank yang menawarkan berbagai produk dan layanan baru, seperti produk investasi, asuransi, dan pembiayaan berbasis teknologi. Regulasi bank harus memastikan bahwa produk-produk ini tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan mencegah praktik yang merugikan seperti misinformasi atau penipuan.

Selain itu, pengawasan bank terkait dengan keamanan data nasabah juga menjadi semakin krusial di era digital ini. Bank, sebagai lembaga yang mengelola data sensitif, diwajibkan untuk memastikan bahwa sistem informasi mereka terlindungi dengan baik dari ancaman cyber. Regulasi terkait dengan keamanan siber menjadi bagian penting dari pengawasan ini, yang bertujuan untuk melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah dan untuk menjaga integritas transaksi perbankan.

Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, sektor perbankan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh regulator harus selalu seimbang antara melindungi nasabah dan mendorong inovasi dalam industri perbankan. Oleh karena itu, pengawasan bank tidak hanya dilihat sebagai tindakan kontrol, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 3

PASAR MODAL DAN INSTRUMENNYA

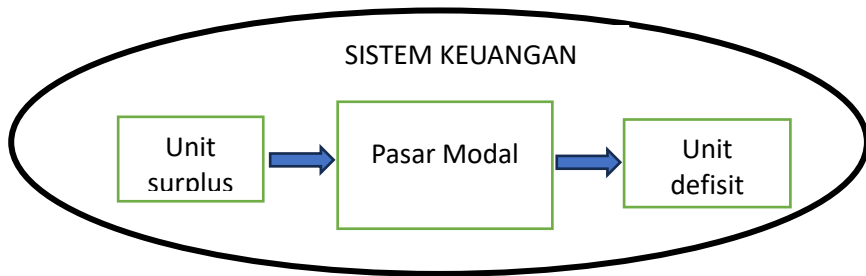
A. PENGERTIAN PASAR MODAL DAN FUNGSINYA

Salah satu elemen penting dalam perekonomian adalah sistem keuangan yang merupakan rangkaian mekanisme yang bertujuan mengalirkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana sebagai modal. Sistem ini berperan aktif dalam perekonomian negara dalam melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan langsung mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan dalam negeri. Menurut Mankiw (2009) sistem keuangan berfungsi untuk mengalirkan dana dari individu dan atau entitas surplus dana ke pihak-pihak yang membutuhkan untuk kepentingan investasi atau konsumsi. Sistem ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam dekade terakhir, teknologi memainkan peran utama dalam sistem keuangan, menurut Claessens et al (2016) infrastruktur yang kuat, seperti system pembayaran digital dapat meningkatkan inklusi keuangan. Secara efisien menyediakan likuiditas, mengalokasikan sumber daya. Namun, tantangan ketidak stabilan ekonomi global dan ketimpangan akses keuangan masih menjadi hal yang mengganggu perekonomian di seluruh dunia. Salah satu bagian dari sistem keuangan, pasar modal adalah elemen kunci dalam pengalihan dana ke arah yang produktif dalam perekonomian. Pasar modal menjadi

katalis, sebagai sarana untuk mendukung pembiayaan jangka panjang, tidak hanya menjadi bagian utama dari mekanisme perdagangan uang. Tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Gambar 3.1
Skema aliran dana



Menurut Weston dan Brigham (1993) pasar modal adalah mekanisme transformasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Pasar ini berfokus pada perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Fungsi utama pasar modal adalah menyediakan sumber modal bagi individu atau perusahaan dan membuka peluang investasi bagi para investor. Perbedaan pasar modal dengan pasar keuangan lain adalah :

a. Instrumen Keuangan Jangka Panjang

Investasi jangka panjang di pasar modal sangat bergantung pada konsep efek kompaun (compound effect), yang memungkinkan keuntungan yang diperoleh dari investasi berkembang menjadi lebih besar bila diinvestasikan kembali. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar investasi jangka panjang, yang menekankan

pentingnya kesabaran dan waktu dalam mencapai hasil yang optimal. Warren Buffett, investor legendaris, sangat mendukung pasar modal sebagai pilihan investasi jangka panjang. Dalam surat tahunan kepada pemegang saham Berkshire Hathaway pada tahun 1996, Buffett menyatakan, "Berinvestasi dalam saham yang bagus pada harga yang wajar adalah salah satu cara terbaik untuk memperoleh kekayaan dalam jangka panjang." Buffett mengutamakan investasi di perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Dia menekankan pentingnya memilih saham dengan keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama di pasar, serta berinvestasi dengan sikap sabar.

Selain Buffett, Eugene Fama, seorang ekonom yang dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2013, berkontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang pasar modal melalui teori pasar efisien (Efficient Market Hypothesis, EMH). Pada tahun 1970, Fama mengemukakan dalam karya seminalnya yang berjudul *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* bahwa pasar saham cenderung efisien dalam memproses informasi. Menurut Fama, harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga tidak ada cara bagi investor untuk mengalahkan pasar secara konsisten dalam jangka pendek. Namun, Fama juga menekankan bahwa dalam jangka panjang, investasi dalam indeks saham atau portofolio yang terdiversifikasi secara luas cenderung memberikan hasil yang lebih baik dan stabil. Hal ini mendukung

gagasan bahwa berinvestasi jangka panjang di pasar modal, dengan mengandalkan portofolio yang terdiversifikasi, adalah strategi yang efektif untuk memperoleh keuntungan.

Peter Lynch, mantan manajer Fidelity Magellan Fund, juga memberikan pandangan berharga tentang investasi jangka panjang. Dalam bukunya *One Up On Wall Street* yang diterbitkan pada tahun 1989, Lynch berpendapat bahwa investor yang memiliki pemahaman mendalam tentang perusahaan-perusahaan yang mereka pilih untuk berinvestasi cenderung memperoleh hasil yang lebih baik. Lynch menekankan bahwa banyak saham terbaik berasal dari perusahaan yang memiliki produk inovatif dan prospek pertumbuhan yang kuat di masa depan. Untuk mencapai keberhasilan dalam investasi jangka panjang, Lynch menyarankan agar investor memilih perusahaan yang mereka pahami dan yakin dengan potensi jangka panjangnya.

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pasar modal adalah pilihan investasi yang menjanjikan untuk jangka panjang. Baik melalui pendekatan berbasis nilai yang disarankan oleh Buffett, melalui prinsip efisiensi pasar yang dikemukakan oleh Fama, atau melalui pemilihan saham dengan fundamental kuat ala Peter Lynch, pasar modal dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang jika dikelola dengan bijak dan sabar.

b. Likuiditas yang Tinggi

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi daya tarik pasar ini sebagai tempat berinvestasi adalah faktor likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan untuk membeli atau menjual suatu aset dengan cepat dan tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Di pasar modal, likuiditas sering kali diukur dengan seberapa mudah seorang investor dapat membeli atau menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya tanpa menyebabkan fluktuasi harga yang besar. Semakin tinggi likuiditas di pasar, semakin mudah bagi investor untuk melakukan transaksi besar tanpa mengganggu harga pasar. Pasar modal yang memiliki tingkat likuiditas tinggi memberikan keuntungan besar bagi para investor. Hal ini sangat penting bagi investor yang menginginkan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, likuiditas yang tinggi juga menciptakan efisiensi pasar, di mana harga aset lebih mencerminkan nilai pasar yang wajar karena banyaknya transaksi yang terjadi.

Likuiditas bukan hanya masalah bagi investor besar atau institusi. Untuk investor ritel, pasar yang likuid memberi mereka kepercayaan diri bahwa mereka dapat membeli atau menjual saham tanpa harus menunggu terlalu lama. Dengan likuiditas yang rendah, investor dapat mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi, atau harga yang mereka dapatkan bisa sangat berbeda dari harga yang tercatat di pasar, karena adanya perbedaan antara harga permintaan dan penawaran. Pada tahun 1970-an, Eugene Fama, seorang ekonom yang dikenal karena

kontribusinya terhadap teori pasar efisien, menyatakan bahwa likuiditas memainkan peran penting dalam efisiensi pasar.

Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1970, *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*, Fama menjelaskan bahwa pasar yang likuid memudahkan informasi untuk tercermin dalam harga aset dengan cepat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Pasar yang lebih likuid cenderung lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga harga aset dapat disesuaikan dengan informasi terbaru tanpa penundaan yang signifikan.

Likuiditas juga memiliki dampak terhadap volatilitas pasar. Di pasar yang likuid, fluktuasi harga cenderung lebih terkendali, karena adanya banyak pembeli dan penjual yang siap bertransaksi. Sebaliknya, di pasar yang kurang likuid, pergerakan harga bisa lebih tajam dan kurang dapat diprediksi, karena perubahan kecil dalam volume perdagangan dapat memengaruhi harga secara signifikan.

c. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan, pasar modal memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana guna mendukung ekspansi atau pengembangan usahanya. Melalui mekanisme pasar modal, perusahaan dapat menerbitkan saham atau obligasi untuk menarik perhatian investor dan mendapatkan sumber

pembiayaan yang diperlukan. Hal ini sangat krusial karena memberikan alternatif bagi perusahaan selain bergantung pada pinjaman bank atau pembiayaan tradisional lainnya.

Selain itu, pasar modal juga berperan dalam meningkatkan likuiditas. Pasar modal yang terorganisir dengan baik memungkinkan investor untuk membeli atau menjual instrumen keuangan seperti saham dan obligasi dengan mudah. Keberadaan pasar yang likuid ini mendorong semakin banyak investor untuk terlibat, yang pada gilirannya mendukung perkembangan pasar modal itu sendiri. Pasar modal juga membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, di mana dana yang terkumpul akan mengalir ke perusahaan atau proyek yang memiliki potensi terbaik untuk menghasilkan keuntungan optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan secara produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya pasar modal juga terletak pada kemampuannya untuk menciptakan transparansi harga. Harga-harga instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, seperti harga saham, terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yang terbuka dan transparan. Hal ini memberikan informasi yang sangat bernilai bagi semua pihak yang terlibat, baik perusahaan, investor, maupun regulator, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Madura (2015), pasar modal memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian modern, karena selain menyediakan pembiayaan untuk

perusahaan, pasar ini juga mengarahkan dana ke sektor-sektor yang paling produktif dan efisien. Brigham dan Ehrhardt (2013) menambahkan bahwa pasar modal juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi harga yang tepat, yang dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi di saat-saat sulit.

pasar modal adalah elemen penting yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Fungsi-fungsi yang dimilikinya, seperti menyediakan pembiayaan, meningkatkan likuiditas, mengalokasikan dana secara efisien, dan menciptakan transparansi harga, menjadikannya salah satu pilar utama dalam perekonomian modern yang berkelanjutan. Pasar modal yang efisien dapat menciptakan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

B. JENIS-JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DI PASAR MODAL

Instrumen keuangan di pasar modal terdiri dari berbagai jenis produk yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi. Instrumen-instrumen ini digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dan oleh investor untuk mencari keuntungan. Berikut adalah beberapa jenis instrumen keuangan di pasar modal:

a. Saham

Saham adalah salah satu instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, dia secara hukum menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut, yang berarti dia memiliki klaim atas aset dan laba perusahaan. Saham diperdagangkan di pasar modal, dan nilainya dapat naik atau turun tergantung pada kinerja perusahaan serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saham biasanya memberikan dua jenis keuntungan bagi pemegangnya: pertama, dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham; dan kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh jika harga saham yang dimiliki mengalami kenaikan dan kemudian dijual pada harga yang lebih tinggi.

Menurut Mankiw (2013) dalam bukunya *Principles of Economics*, saham merupakan salah satu bentuk investasi yang bisa memberikan return (imbal hasil) yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti obligasi. Mankiw menjelaskan bahwa saham memberikan peluang keuntungan melalui pembagian dividen dan apresiasi harga saham yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan modal, meskipun dengan tingkat risiko yang tinggi. Saham juga memiliki peran penting dalam perekonomian karena memungkinkan perusahaan untuk mengakses dana dari investor tanpa perlu berhutang, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk ekspansi dan inovasi.

Di sisi lain, Richard Brealey dan Stewart Myers (2015) dalam *Principles of Corporate Finance* menyebutkan bahwa saham adalah salah satu instrumen yang penting bagi perusahaan dalam hal penggalangan dana. Brealey dan Myers menyatakan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham memperoleh keuntungan karena dana yang diterima dari penjualan saham tidak perlu dibayar kembali seperti halnya utang. Namun, di sisi lain, mereka juga harus membagi keuntungan dengan pemegang saham berupa dividen dan memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Pendapat ahli pasar modal, seperti John C. Hull (2015) dalam bukunya *Options, Futures, and Other Derivatives*, juga menekankan bahwa saham memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Hull berpendapat bahwa meskipun saham dapat sangat volatile dalam jangka pendek, dengan investasi yang tepat dan waktu yang panjang, saham dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan instrumen investasi lainnya, seperti obligasi atau deposito. Di pasar modal, saham merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Secara umum, saham di pasar modal dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Saham Biasa (Common Stock):

- Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum dan banyak diperdagangkan di pasar modal.

- Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan berhak atas dividen jika perusahaan memberikan pembagian keuntungan.
- Pemegang saham biasa juga berhak atas sisa hasil perusahaan jika terjadi likuidasi, tetapi setelah memenuhi kewajiban kepada kreditor dan pemegang saham preferen.
- Risiko bagi pemegang saham biasa cukup tinggi, karena peringkat klaim mereka lebih rendah dibandingkan pemegang saham preferen.

b. Saham Preferen (Preferred Stock):

- Saham preferen memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen terlebih dahulu, sebelum pemegang saham biasa.
- Meskipun pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS, mereka memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi.
- Dividen pada saham preferen seringkali tetap (fixed), dan pemegangnya lebih terlindungi dari volatilitas pasar.

c. Saham Pengembang (Growth Stock):

- Saham pengembang atau growth stock adalah saham dari perusahaan yang diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang cepat dalam pendapatan dan laba.
- Saham jenis ini sering menarik bagi investor yang mencari apresiasi modal jangka panjang.

d. Saham Dividen (Dividend Stock):

- Saham dividen adalah saham dari perusahaan yang secara rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
- Saham jenis ini menarik bagi investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen yang dibagikan secara teratur.
- Perusahaan yang membayar dividen biasanya adalah perusahaan yang sudah mapan dengan arus kas yang stabil.

e. Saham Blue Chip:

- Saham blue chip adalah saham dari perusahaan besar, mapan, dan memiliki reputasi yang sangat baik di pasar modal.
- Perusahaan-perusahaan ini seringkali merupakan pemimpin dalam industri masing-masing dan memiliki kinerja yang stabil.
- Saham blue chip umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif lebih aman, meskipun tidak selalu bebas risiko.

f. Saham LQ45:

- LQ45 adalah indeks saham yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar di Indonesia.
- Saham-saham yang masuk dalam indeks ini dianggap sebagai saham yang cukup solid dan stabil untuk investasi jangka menengah hingga panjang.

g. Saham Spekulatif:

- Saham spekulatif adalah saham yang memiliki tingkat risiko tinggi, seringkali berasal dari perusahaan yang baru berkembang atau memiliki kinerja keuangan yang fluktuatif.
- Investor yang membeli saham spekulatif cenderung mengharapkan apresiasi harga yang cepat, tetapi juga siap menghadapi risiko kerugian besar.

Jenis-jenis saham ini memberikan berbagai pilihan bagi investor untuk memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial mereka.

b. Obligasi (Bond)

Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai surat utang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok utang pada waktu yang telah disepakati. Secara umum, obligasi diterbitkan sebagai cara bagi penerbit untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai keperluan, seperti ekspansi perusahaan, pembangunan infrastruktur, atau pembiayaan lainnya. Dalam obligasi, penerbit berkomitmen untuk membayar bunga atau kupon sesuai jadwal yang telah ditentukan dan melunasi pokok utangnya pada saat jatuh tempo.

Menurut ahli keuangan terkemuka, seperti Richard A. Brealey dan Stewart C. Myers dalam buku mereka yang berjudul *Principles of Corporate Finance* (2003), obligasi dipandang sebagai instrumen yang memberikan pendapatan tetap bagi investor, karena pembayaran bunga yang terjadwal dan dapat diprediksi. Brealey dan Myers menyatakan bahwa obligasi memiliki keuntungan dalam hal kestabilan pendapatan dan lebih sedikit terpengaruh oleh fluktuasi pasar jika dibandingkan dengan saham. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pemahaman tentang risiko terkait dengan obligasi, seperti risiko gagal bayar (default risk) yang dapat terjadi jika penerbit obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, John Hull, dalam bukunya *Options, Futures, and Other Derivatives* (2011), menjelaskan bahwa obligasi adalah instrumen yang sangat relevan dalam manajemen risiko bagi banyak investor. Hull menggambarkan obligasi sebagai alat untuk mendiversifikasi portofolio investasi, karena meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko, obligasi sering kali memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap volatilitas pasar yang tinggi dibandingkan dengan instrumen ekuitas seperti saham.

Melihat pandangan-pandangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa obligasi merupakan alat yang sangat penting baik bagi penerbit untuk mengumpulkan dana maupun bagi investor untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil. Namun, keputusan untuk berinvestasi dalam obligasi harus selalu didasarkan pada

pertimbangan yang cermat terhadap risiko dan imbal hasil yang dapat diharapkan dari instrumen tersebut.

c. Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah atau perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang) oleh manajer investasi. Reksa dana terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aset yang diinvestasikan, antara lain:

- Reksa Dana Saham: Investasi lebih besar pada saham.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap: Investasi lebih besar pada obligasi.
- Reksa Dana Campuran: Kombinasi antara saham dan obligasi.
- Reksa Dana Pasar Uang: Investasi pada instrumen pasar uang seperti deposito dan surat berharga jangka pendek.

d. Warrant

Warrant adalah instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak (tapi bukan kewajiban) untuk membeli saham penerbit pada harga yang sudah ditentukan (harga eksekusi atau strike price) dalam periode waktu tertentu. Warrant umumnya diterbitkan oleh perusahaan bersama dengan surat utang atau instrumen lain, sebagai bagian dari paket investasi untuk menarik investor. Berbeda dengan opsi, warrant biasanya diterbitkan langsung oleh perusahaan yang sahamnya menjadi dasar untuk warrant tersebut. Ciri Warrant :

1. Hak untuk membeli saham: Pemegang warrant memiliki hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, selama periode yang telah ditetapkan. Jika warrant diterbitkan dengan harga eksekusi yang lebih rendah daripada harga pasar saham pada saat eksekusi, maka pemegang warrant dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut.
2. Jangka waktu: Warrant memiliki jangka waktu tertentu yang telah ditentukan pada saat penerbitannya. Periode ini bisa berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun. Setelah masa berlakunya habis, warrant akan kedaluwarsa dan tidak bisa digunakan lagi.
3. Harga eksekusi (strike price): Ini adalah harga yang harus dibayar pemegang warrant untuk membeli saham yang ditawarkan melalui warrant. Harga ini seringkali ditentukan lebih rendah dari harga pasar saham pada saat penerbitan warrant, memberikan insentif bagi pemegang warrant untuk membeli saham perusahaan di masa depan jika harga saham tersebut meningkat.

Jenis warrant, Ada beberapa jenis warrant, di antaranya:

- a. Warrant saham: Memberi hak untuk membeli saham biasa perusahaan.
- b. Warrant obligasi: Memberi hak untuk membeli saham perusahaan dengan dasar obligasi yang diterbitkan bersamaan dengan warrant tersebut.

- c. Warrant terpisah (detachable warrant): Dapat dipisahkan dari instrumen keuangan lainnya (seperti obligasi) dan diperdagangkan secara terpisah di pasar saham.

Tujuan penerbitan warrant: Perusahaan dapat menerbitkan warrant sebagai cara untuk menarik investor dengan memberikan potensi keuntungan tambahan di masa depan. Warrant sering digunakan dalam penerbitan obligasi atau surat utang sebagai bagian dari paket insentif untuk membuat instrumen tersebut lebih menarik. Selain itu, penerbitan warrant bisa membantu perusahaan memperoleh modal tambahan jika warrant dieksekusi.

Warrant memberikan kesempatan bagi pemegangnya untuk mendapatkan keuntungan jika harga saham perusahaan yang menerbitkan warrant tersebut naik. Namun, jika harga saham tidak bergerak sesuai harapan, warrant bisa berakhir menjadi tidak berharga setelah masa berlakunya habis.

e. Derivatif

Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada harga aset dasar, seperti saham, obligasi, atau komoditas. Jenis-jenis derivatif antara lain:

- Futures: Kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah disepakati pada waktu tertentu di masa depan.

- Option: Memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam waktu tertentu, namun tidak wajib melakukannya.
- Swap: Perjanjian untuk menukar aliran kas yang berbeda, seperti suku bunga atau mata uang.

f. Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)

Surat berharga komersial adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Biasanya, instrumen ini tidak dilengkapi dengan agunan dan memiliki jangka waktu yang relatif singkat, antara beberapa hari hingga satu tahun.

Commercial paper (CP) adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara meminjam uang dari pasar uang. Instrumen ini umumnya digunakan oleh perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau untuk mengelola arus kas mereka dalam periode waktu yang relatif singkat. Penerbitan CP tidak disertai dengan jaminan apapun, sehingga investor yang membeli commercial paper melakukannya berdasarkan kepercayaan terhadap reputasi dan kredibilitas perusahaan yang menerbitkannya.

Commercial paper memiliki jangka waktu yang biasanya tidak lebih dari satu tahun, dengan banyak yang jatuh tempo dalam waktu 30 hingga 90 hari. Biasanya, instrumen ini dijual dengan harga diskon, yang berarti perusahaan menerbitkannya dengan

harga lebih rendah dari nilai nominal yang akan dibayar saat jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, perusahaan akan membayar kembali jumlah penuh yang tertera di surat berharga tersebut kepada pemegangnya.

Investasi dalam commercial paper relatif lebih aman dibandingkan instrumen pasar uang lainnya karena umumnya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peringkat kredit yang baik. Meskipun demikian, karena tidak ada jaminan fisik, investor tetap bergantung pada reputasi dan kekuatan finansial penerbit. Commercial paper biasanya dibeli oleh institusi keuangan, dana pensiun, dan investor institusional lainnya yang mencari instrumen jangka pendek dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi daripada simpanan bank atau surat berharga jangka pendek lainnya.

g. ETF (Exchange-Traded Fund)

ETF (Exchange-Traded Fund) adalah suatu jenis reksa dana yang diperdagangkan di bursa saham seperti halnya saham biasa. ETF menggabungkan fitur-fitur reksa dana dan saham, di mana investor dapat membeli dan menjual unit ETF sepanjang hari di pasar saham dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan pergerakan pasar. ETF berinvestasi dalam portofolio aset yang terdiversifikasi, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks pasar, dan bertujuan untuk mencerminkan kinerja suatu indeks atau sektor tertentu.

ETF memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya instrumen yang populer di pasar modal. Salah satunya adalah likuiditas yang tinggi. Karena diperdagangkan di bursa, ETF dapat dibeli dan dijual kapan saja selama jam perdagangan bursa, yang memberikan fleksibilitas lebih kepada investor dibandingkan dengan reksa dana tradisional yang hanya diperdagangkan pada harga penutupan di akhir hari. Keunggulan lain adalah transparansi, karena banyak ETF yang diperdagangkan mencerminkan indeks atau portofolio yang jelas, sehingga investor dapat dengan mudah mengetahui komposisi dan kinerja portofolio tersebut.

Di sisi lain, ETF juga memiliki biaya manajerial yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksa dana aktif karena dikelola secara pasif, mengikuti indeks atau strategi yang sudah ditentukan. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang ingin mendapatkan diversifikasi dengan biaya lebih efisien. Namun, beberapa ahli bursa juga mengingatkan bahwa meskipun ETF menawarkan diversifikasi, investor tetap harus berhati-hati terhadap volatilitas pasar yang bisa memengaruhi harga unit ETF. Sifat ETF yang diperdagangkan sepanjang hari membuatnya lebih rentan terhadap fluktuasi harga yang cepat.

ETF merupakan instrumen yang efektif untuk memperoleh eksposur terhadap berbagai kelas aset, sektor industri, atau strategi investasi tanpa perlu membeli saham atau instrumen

individual satu per satu. Selain itu, dengan adanya beragam jenis ETF, mulai dari yang berbasis indeks hingga ETF berbasis sektor atau tema tertentu, investor dapat memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya.

C. PROSES PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SEKURITAS

Proses Penerbitan dan Perdagangan Sekuritas merujuk pada serangkaian langkah yang dilalui suatu sekuritas (seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya) mulai dari penerbitannya oleh perusahaan hingga perdagangan di pasar modal. Berdasarkan pandangan ahli dan teori yang ada, proses ini melibatkan beberapa tahap yang melibatkan berbagai pihak seperti emiten (perusahaan yang menerbitkan sekuritas), investor, regulator, dan lembaga-lembaga pasar modal.

a. Penerbitan Sekuritas (Initial Public Offering – IPO)

Penerbitan sekuritas adalah tahap pertama dalam proses ini, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penawaran umum sekuritas. Sekuritas yang diterbitkan bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, antara lain:

- **Persiapan Emiten:** Perusahaan yang ingin menerbitkan sekuritas harus mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan, seperti laporan keuangan, prospektus, dan

rencana penggunaan dana. Dokumen ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal.

- **Underwriting:** Perusahaan biasanya akan bekerja sama dengan bank investasi atau perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai underwriter (penjamin emisi) yang akan membantu dalam menetapkan harga, jumlah sekuritas yang akan diterbitkan, dan strategi pemasaran.
- **Penawaran Umum:** Setelah persiapan selesai, sekuritas tersebut ditawarkan kepada publik melalui proses yang disebut *initial public offering* (IPO) untuk saham atau *bond issuance* untuk obligasi. Pada tahap ini, perusahaan menawarkan sekuritas kepada investor dengan harga yang telah disepakati.
- **Persetujuan Regulator:** Semua kegiatan penerbitan sekuritas harus mendapatkan persetujuan dari otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia atau Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Ini bertujuan untuk melindungi investor dan memastikan transparansi pasar.

Menurut Fama (1970), yang dikenal dengan *Efficient Market Hypothesis* (EMH), penerbitan sekuritas melalui IPO atau pasar modal berfungsi untuk memberikan informasi yang memadai kepada pasar, yang pada gilirannya akan menentukan harga sekuritas yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia.

b. Perdagangan Sekuritas di Pasar Modal

Setelah sekuritas diterbitkan, proses berikutnya adalah perdagangan sekuritas di pasar modal. Ada dua jenis pasar utama di sini:

- **Pasar Primer:** Merupakan pasar di mana sekuritas pertama kali diterbitkan dan dijual kepada investor (misalnya, IPO). Di pasar primer ini, dana yang diperoleh dari penjualan sekuritas akan masuk ke perusahaan yang menerbitkan sekuritas.
- **Pasar Sekunder:** Setelah sekuritas diterbitkan dan dijual di pasar primer, sekuritas tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, seperti bursa saham (misalnya, BEI di Indonesia, NYSE di AS). Di pasar sekunder, investor dapat membeli dan menjual sekuritas tanpa melibatkan emiten, dan harga sekuritas akan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.

Harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar sekunder dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti risiko, ekspektasi laba, dan kondisi makroekonomi, dan pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan setelah sekuritas diperdagangkan.

c. Peran Lembaga dan Regulator

- **Otoritas Pasar Modal:** Regulator seperti OJK di Indonesia, SEC di AS, atau Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris berfungsi untuk mengawasi dan mengatur pasar modal. Mereka memastikan bahwa kegiatan penerbitan dan

perdagangan sekuritas dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan investor.

- Bursa Efek: Bursa seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) atau NYSE berperan sebagai tempat transaksi sekuritas yang terorganisir. Bursa ini juga menyediakan infrastruktur yang memastikan transaksi dilakukan dengan transparansi dan efisiensi.
- Penyelesaian dan Kliring: Lembaga kliring dan penyelesaian (misalnya, KSEI di Indonesia) berfungsi untuk menyelesaikan transaksi jual beli sekuritas antara investor. Setelah transaksi selesai di pasar sekunder, lembaga ini memastikan bahwa pemindahan kepemilikan sekuritas dan pembayaran dilakukan secara efisien.

d. Pasar Sekunder dan Likuiditas

Pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor yang ingin menjual sekuritas yang dimilikinya. Likuiditas ini menjadi penting karena investor dapat dengan mudah membeli dan menjual sekuritas di pasar sekunder, yang berfungsi untuk menentukan harga pasar dari sekuritas tersebut. Menurut teori likuiditas oleh Amihud dan Mendelson (1986), likuiditas di pasar sekunder dapat memengaruhi harga sekuritas. Semakin likuid pasar, semakin kecil premi risiko yang dikenakan pada harga sekuritas.

Proses penerbitan dan perdagangan sekuritas juga melibatkan pertimbangan terhadap risiko dan potensi return yang dihadapi

oleh investor. Investor membeli sekuritas dengan harapan mendapatkan imbal hasil (dividen, bunga, atau capital gain), tetapi mereka juga menghadapi risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Menurut teori portofolio oleh Harry Markowitz (1952), investor dapat mengurangi risiko melalui diversifikasi portofolio, yaitu dengan memegang berbagai jenis sekuritas yang tidak berkorelasi. Ini dapat memaksimalkan pengembalian dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

D. ANALISIS INVESTASI DI PASAR MODAL

Analisis Investasi di Pasar Modal adalah proses evaluasi dan penilaian berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keputusan investasi di pasar saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat, guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.

Secara umum, analisis investasi di pasar modal dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama:

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental berfokus pada kondisi ekonomi, keuangan, dan faktor internal perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja saham atau instrumen keuangan lainnya. Berikut beberapa elemen utama dalam analisis fundamental:

- Laporan Keuangan Perusahaan: Ini termasuk analisis laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas perusahaan untuk menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.
- Rasio Keuangan: Investor sering menggunakan rasio-rasio seperti Price-to-Earnings (P/E) ratio, Return on Equity (ROE), Debt-to-Equity (D/E), dan lainnya untuk menilai kinerja dan valuasi saham.
- Prospek Industri: Melakukan analisis terhadap sektor atau industri tempat perusahaan beroperasi. Faktor-faktor seperti tren pasar, permintaan produk, dan persaingan industri sangat penting.
- Faktor Ekonomi Makro: Menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan fiskal, dan faktor eksternal (misalnya perang atau krisis ekonomi global) yang dapat memengaruhi pasar.
- Manajemen Perusahaan: Kepemimpinan dan kinerja tim manajemen dalam mengelola perusahaan dan merencanakan strategi jangka panjang.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga dan volume perdagangan historis untuk meramalkan pergerakan harga di masa depan. Prinsip dasar dari analisis teknikal adalah bahwa semua informasi pasar sudah tercermin dalam harga dan volume, sehingga dengan menganalisis data ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Beberapa alat yang digunakan dalam analisis teknikal antara lain:

- **Grafik Harga:** Investor menggunakan grafik harga untuk mengidentifikasi pola dan tren, seperti tren naik (bullish) atau tren turun (bearish).
- **Indikator Teknikal:** Misalnya Moving Average, Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, dan MACD, yang membantu mengidentifikasi potensi titik balik dalam pergerakan harga.
- **Volume Perdagangan:** Volume yang tinggi dapat menunjukkan kekuatan dari sebuah pergerakan harga tertentu. Sebaliknya, volume rendah bisa menandakan kebingungan pasar atau tren yang lemah.
- **Support dan Resistance:** Titik harga di mana saham atau aset cenderung berhenti turun (support) atau berhenti naik (resistance), memberikan indikasi level-level psikologis di pasar.

Analisis investasi di pasar modal adalah kombinasi dari berbagai pendekatan dan teknik untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas. Dengan memanfaatkan analisis fundamental, teknikal, dan penilaian risiko, serta menjaga keberagaman portofolio, investor dapat meningkatkan peluang untuk meraih keuntungan yang optimal dan mengelola risiko secara efektif.

E. REGULASI PASAR MODAL DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

Regulasi di pasar modal adalah serangkaian aturan, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan pasar modal berfungsi dengan transparan, efisien, dan adil. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, menjaga integritas pasar, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti manipulasi pasar, penipuan, dan insider trading.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait regulasi di pasar modal dan perlindungan investor:

a. Regulasi Pasar Modal

- Undang-Undang Pasar Modal (UUPM): Di Indonesia, pasar modal diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. UU ini menetapkan berbagai aturan terkait penerbitan efek, perdagangan saham, dan kewajiban emiten serta lembaga yang terlibat.

Gambar 3.2

Lembaga keuangan dan Lembaga Penjamin



- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK adalah lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. OJK mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional pasar modal, perusahaan sekuritas, dan penyelenggara pasar modal.
- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam): Lembaga yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.
- Bursa Efek: Bursa Efek Indonesia (BEI) berfungsi sebagai tempat perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Bursa ini memiliki aturan yang mengatur transaksi yang berlangsung di pasar modal, baik di pasar reguler maupun pasar negosiasi.
- Prospektus: Setiap perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum (IPO) atau penerbitan efek wajib menyusun prospektus yang harus disetujui oleh OJK. Prospektus ini berisi informasi penting tentang perusahaan, termasuk laporan keuangan, risiko yang dihadapi, dan tujuan penerbitan efek.

b. Perlindungan Investor

- Transparansi dan Informasi: Regulasi pasar modal mewajibkan emiten untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik, baik mengenai kondisi

keuangan perusahaan, risiko investasi, maupun perubahan penting yang dapat mempengaruhi harga saham atau instrumen keuangan lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa investor dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang valid.

- Pencegahan Manipulasi Pasar: Salah satu peraturan penting di pasar modal adalah pencegahan terhadap manipulasi pasar dan praktik insider trading. Manipulasi pasar, seperti penipuan dalam perdagangan saham, dan insider trading, yaitu perdagangan saham berdasarkan informasi yang tidak tersedia untuk publik, dilarang keras oleh regulasi.
- Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: Regulasi pasar modal juga melindungi investor dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan, manajer investasi, atau pihak terkait lainnya yang bisa merugikan investor kecil. Misalnya, dalam hal emiten yang tidak mengungkapkan informasi material yang bisa mempengaruhi keputusan investasi.
- Penyelesaian Sengketa: Untuk melindungi investor, pasar modal juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan maupun melalui lembaga seperti Bursa Efek Indonesia yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antar investor atau antara investor dan perusahaan.
- Sanksi dan Penegakan Hukum: OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh emiten, perusahaan sekuritas, atau pihak lainnya, termasuk denda, penghentian perdagangan, hingga pembekuan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas pasar modal.

c.. Kebijakan Perlindungan Investor di Indonesia

- Investor Protection Fund (IPF): Untuk memberikan rasa aman kepada investor, OJK juga mengatur perlindungan melalui mekanisme jaminan dana investor apabila terjadi kegagalan lembaga penyelenggara pasar modal.
- Edukasi dan Literasi Keuangan: Sebagai bagian dari perlindungan investor, OJK juga aktif dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar investor memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan cara berinvestasi di pasar modal.
- Regulasi yang Mendorong Keamanan dan Kepercayaan: Regulasi di pasar modal juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi investor. Dengan pengawasan yang ketat, investor dapat merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam pasar modal.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai, pasar modal diharapkan dapat tumbuh dengan sehat, memberikan keuntungan bagi investor, dan mendukung perkembangan ekonomi negara.

BAB 4

LEMBAGA DAN MEKANISME PASAR MODAL

A. LEMBAGA-LEMBAGA PASAR MODAL: OJK, BEI DAN PENJAMIN EMISI

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan global, menyediakan platform untuk penggalangan dana melalui saham dan obligasi, serta memberikan peluang investasi bagi investor. Seiring berkembangnya dinamika global, tantangan seperti perubahan iklim dan implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin relevan dalam memengaruhi pasar modal. Isu-isu ini tidak hanya memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor tetapi juga menciptakan peluang untuk transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pasar modal (*capital market*) merupakan tempat untuk berbagai transaksi instrumen keuangan jangka panjang, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana memperoleh pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah, selain itu juga sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Secara mikro dan makro keberadaan Pasar Modal bermanfaat dan menguntungkan para pemangku kepentingan. Bagi investor akan mendapatkan return berupa deviden dan capital gain, sedangkan emiten akan mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan bisnisnya. Secara

makro kehadiran pasar modal akan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran, selain itu meningkatkan produktivitas sehingga menambah Pendapatan nasional.

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan, kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2011 yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan: Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank, mulai tahun 2013. Sehingga tugas/fungsi pengawasannya beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK tertulis bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia,

pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, berupa: independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Pada pasal 5 UU Nomor 21 tahun 2011 maka fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pada pasal 6 disebutkan bahwa tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pada pasal 7 maka wewenang OJK adalah tentang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan berupa: Kelembagaan, Kesehatan, Kehati-hatian, Pemeriksaan.

Berlandaskan Penjelasan pasal 7 UU OJK maka kewenangan Bank Indonesia berupa: Lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan

makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan

Pada pasal 8 dan pasal 9 berkaitan dengan pengawasan jasa keuangan meliputi: Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan informasi tersebut maka, dapat diartikan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen. Sehingga OJK bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud maka OJK mempunyai wewenang:

- 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan ini sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Adapun Fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari: Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan; Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK mengacu pada *international best practices*. Contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*; ketentuan asuransi akan mengacu pada *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS); ketentuan pasar modal akan mengacu pada *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) sedangkan pengawasannya mengacu kepada pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM); dan ketentuan industri

jasa keuangan syariah akan mengacu pada *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawasan *on-site* dan *off-site* tersebut sangat penting untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK.

Aspek-aspek pengawasan yang dilakukan OJK untuk pasar modal mengacu kepada pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Selanjutnya untuk pengaturan dan pengawasan terhadap IKNB mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2014 Pasal 60 tentang Perasuransian; UU Nomor 11 tahun 1992 Bab IV pasal 50 tentang Dana Pensiun; Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; UU Nomor 2 tahun 2009 Pasal 40 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; UU Nomor 1 tahun 2016 Pasal 27 tentang Penjaminan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/ KMK.014/1998 tentang Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2013 Pasal 28 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM).

OJK melakukan pengawasan terintegrasi sesuai dengan bunyi UU Nomor 21 tahun 2011 Pasal 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan

bahwa: OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut.

Pengawasan *Market Conduct* OJK didasarkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa “*market conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan”.

Secara harfiah, *conduct* dapat diartikan sebagai *behavior*, atau perilaku. Oleh karena itu *market conduct* merupakan bentuk perilaku pelaku pasar. Sampai saat ini secara mudah pelaku pasar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk. Sehingga dalam konteks sektor jasa keuangan, *market conduct* adalah perilaku dari pelaku pasar di sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen keuangan yang harus diterapkan yaitu (1) transparansi; (2) perlakuan yang adil; (3) keandalan; (4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; (5) serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. OJK menerapkan pengawasan market conduct secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek merupakan institusi yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek.

Bursa efek merupakan sarana untuk berdagang efek antar investor, yaitu efek dari perusahaan yang sudah *go public*. Bursa efek sebagai sarana atau tempat berdagang bagi para Anggota Bursa. Untuk menjadi anggota bursa maka perusahaan efek harus mempunyai atau memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) yang dikeluarkan oleh lembaga bursa efek. Oleh karena itu di Indonesia pemilik bursa efek adalah para perusahaan efek.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bursa saham hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek

Surabaya (BES). Penggabungan BEJ dan BES dilakukan pada tanggal 30 November 2007, dan mulai aktif menjadi BEI sejak 1 Desember 2007. BEI berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan perdagangan efek di pasar modal.

Investasi adalah penempatan sejumlah modal yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang (Kanie, Bodie dan Markus; 2007). Investasi adalah pengorbanan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar (Sharpe, Bailey, Alexander, 1998). *“An Investment can be defined commitmen of funds to one or more assets that will be held some future time period”* (Jones, 2014). Bagi investor dapat berinvestasi secara global, hal ini terjadi dikarenakan adanya globalisasi investasi, sehingga investor dapat berinvestasi dinegara manapun yang diperkirakan akan dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu ketika perusahaan investasi yang beroperasi secara internasional maka para investor mempunyai kesempatan lebih luas dalam melakukan diversifikasi internasional. Investor akan dapat memperoleh berbagai kemudahan ketika melakukan aktivitas transaksi (jual-beli) instrumen keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal didefinisikan bahwa, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain

dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Bursa efek dapat membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya.

Adapun secara inti tugas bursa efek berupa:

- 1) Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien
- 2) Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek
- 3) Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, dan melaporkannya kepada Bapepam-LK
- 4) Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi

3. Penjamin Emisi

Penjamin emisi efek (*underwriter*) adalah pihak yang membuat atau melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (*full commitment and non full commitment*).

Adapun kewajiban yang dilakukan harus mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten.

B. MEKANISME PERDAGANGAN SEKURITAS DI PASAR MODAL

Berdasarkan sumber resmi yang dituliskan pada laman <https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-dan-jam-perdagangan>, maka mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS NEXT-G. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa (AB) yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Pelaksanaan perdagangan di Pasar Reguler dimulai dengan Pra-pembukaan. Anggota Bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga (*fraksi*) dan ketentuan *auto rejection*. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh JATS NEXT-G pada harga tertentu pada periode Pra-pembukaan. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di Pra-pembukaan, akan diproses secara langsung (tanpa memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli) pada sesi I perdagangan, kecuali Harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan *auto rejection*.

Pada masa Pra-Penutupan, Anggota Bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga (*fraksi*) dan ketentuan

auto rejection. JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.

Dalam Pelaksanaan Pasca Penutupan, Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.

Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) efek. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (tidak *round lot*). Satuan Perubahan Harga (*fraksi*) sesuai Peraturan II-A Kep-00196/BEI/12-2024.

C. PENAWARAN UMUM (IPO) DAN PROSES PEMBUKAAN SAHAM

Initial Public Offering (IPO) merupakan sebuah proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas. Istilah ini dapat juga dinamakan dengan penawaran umum perdana. Oleh karena itu sebuah perusahaan terdapat nama tambahannya menjadi perusahaan terbuka sehingga misalnya menjadi PT. Baik Sekali. Tbk. Pasar perdana merupakan pasar pada saat saham diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di BEI. Dalam hal ini,

biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui *underwriter* kepada investor dengan mekanisme Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* – IPO). Emiten saham merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham, sehingga pembelinya adalah masyarakat umum.

Setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan menambah dana bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas (emiten), karena transaksi hanya terjadi antar investor, bukan dengan perusahaan.

Sebuah perusahaan yang berencana IPO, maka terdapat beberapa langkah yang harus dipersiapkan. **Pertama**, perusahaan membentuk tim internal yang terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan dan aspek legal. Tim internal akan bekerjasama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. **Kedua**, menunjuk *underwriter* yakni pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. **Ketiga**, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Adapun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan dan lain-lain. **Keempat**, menyampaikan permohonan pendaftaran saham

untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, BEI akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan. Berikutnya perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada BEI disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Kemudian BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa.

Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan setelah melakukan IPO yakni:

1. Mendapatkan Dana Segar: Dana yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan, akuisisi perusahaan lain, atau membayar utang. Dengan ekspansi bisnis akan meningkatkan produktivitas emiten.
2. Meningkatkan Reputasi: IPO dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Kinerja perusahaan akan

diketahui oleh publik, sehingga emiten berupaya terus meningkatkan kredibilitasnya.

3. Meningkatkan Likuiditas Saham: Saham perusahaan menjadi lebih likuid karena dapat diperdagangkan di bursa.
4. Mempermudah Akses ke Pendanaan: Setelah IPO, perusahaan lebih mudah mendapatkan pendanaan tambahan melalui penerbitan saham baru.

Pada awal tahun 2025, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (IPO). Lima emiten terbaru yang terdaftar di bursa adalah PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII), PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), PT Hero Global Investment Tbk. (HGII), dan PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC).

PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) merupakan salah satu perusahaan yang mengawali pasar IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Januari tahun 2025. Sebagai perusahaan asuransi digital, YOII menawarkan solusi berbasis teknologi yang diharapkan dapat memperkuat posisi pasar mereka. Dalam proses penawaran umum perdana (IPO), YOII menawarkan sebanyak 412.087.500 saham baru kepada publik, setara dengan 12,03% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran saham ditetapkan dalam kisaran Rp100 hingga Rp110 per saham, dengan tujuan menggaling dana maksimal sebesar Rp45,33 miliar.

PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX) adalah perusahaan yang bergerak di sektor real estate, dengan fokus pada pengembangan kawasan perumahan. Perusahaan ini melakukan IPO pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sampai 6 Januari 2025. KSIX menawarkan sebanyak 320.674.800 saham baru kepada publik, setara dengan 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran untuk saham ini ditetapkan dalam kisaran Rp312 hingga Rp468 per saham, dengan potensi dana yang dapat dihimpun mencapai Rp150,07 miliar.

PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) merupakan perusahaan di sektor energi, khususnya minyak dan gas. Masa penawaran umum akan berlangsung pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025. Dalam IPO ini, RATU menawarkan sebanyak 543.010.800 saham baru, setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran saham ditetapkan dalam kisaran Rp900 hingga Rp1.150 per saham, dengan potensi total dana yang dihimpun mencapai sekitar Rp600 miliar.

PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) merupakan perusahaan di bidang energi baru terbarukan (EBT), salah satu sektor yang kini mendapat perhatian global seiring dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengatasi perubahan iklim. Untuk tahapan IPO, perseroan menjadwalkan penawaran umum pada tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, penjabatan efek pada tanggal 7 Januari 2025, distribusi saham pada tanggal 8 Januari 2025, dan melantai di BEI pada tanggal 9 Januari

2025. Dalam IPO ini, PT Hero Global Investment Tbk. menawarkan sebanyak 1.300.000.000 saham baru, setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Rentang harga penawaran untuk saham tersebut adalah antara Rp200 hingga Rp230 per saham, yang berpotensi menghasilkan dana yang dihimpun antara Rp260 miliar hingga Rp299 miliar.

PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRRC) merupakan sebuah perusahaan di industri makanan, dengan fokus utama pada produksi roti dan kue. BRRRC memulai masa masa penawaran umum pada tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Januari 2025. Perusahaan ini melaksanakan IPO (*Initial Public Offering*), menawarkan 291.500.000 saham, setara dengan 30,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Rentang harga penawaran untuk saham tersebut adalah antara Rp200 hingga Rp210 per saham. Berdasarkan harga penawaran tersebut, BRRRC berpotensi untuk menghimpun dana sekitar Rp58,3 miliar hingga Rp61,2 miliar dari pasar modal.

D. PERAN RATING AGENSI DAN PENGARUHNYA PADA PASAR MODAL

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya,

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK.

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Selain itu, Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan. Selanjutnya, Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud.

Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Saat ini terdapat beberapa perusahaan pemeringkat efek, yaitu Fitch Rating, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT. Fitch Rating Indonesia, PT PEFINDO dan PT Kasnic Credit Rating Indonesia.

E. STRUKTUR PASAR MODAL DAN KLASIFIKASI INSTRUMEN INVESTASI

Pasar modal Indonesia adalah sistem keuangan yang terdiri dari berbagai institusi, instrumen, dan infrastruktur yang memfasilitasi perdagangan efek, seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Struktur pasar modal Indonesia mencakup beberapa elemen kunci:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan pasar modal di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam mengeluarkan peraturan, memberikan izin, dan mengawasi pelaku pasar modal.
- 2) Bursa Efek Indonesia (BEI): BEI adalah bursa efek yang menyediakan tempat untuk perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. BEI merupakan tempat utama di mana investor dan emiten bertemu untuk melakukan transaksi.
- 3) Perusahaan emiten: Perusahaan yang menerbitkan efek ke pasar modal untuk memperoleh dana. Emiten dapat berupa perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek atau perusahaan swasta yang menerbitkan obligasi.
- 4) Pialang efek: Pialang efek adalah perantara perdagangan efek antara investor dan bursa efek. Mereka bertindak atas nama investor untuk melakukan transaksi jual beli efek.
- 5) Investor: Terdiri dari individu, institusi keuangan, atau entitas lainnya yang membeli dan menjual efek di pasar modal untuk mencapai tujuan investasi mereka.

- 6) Instrumen keuangan: Termasuk saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen ini merupakan produk investasi yang dapat diperdagangkan antara investor di pasar modal.
- 7) Lembaga kliring dan penjaminan (LKP): Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan kliring dan penjaminan transaksi di pasar modal. Mereka memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di pasar modal dilaksanakan dengan lancar dan aman.
- 8) Perusahaan sekuritas: Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan investasi, termasuk penasihat investasi, manajemen portofolio, dan penjamin emisi efek.
- 9) Asosiasi pasar modal: Asosiasi ini merupakan organisasi yang mewadahi para pelaku pasar modal, seperti perusahaan sekuritas, untuk meningkatkan standar dan praktek bisnis di pasar modal.

BAB 5

ISU TERKINI DALAM INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL

A. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM INSTITUSI KEUANGAN (FINTECH DAN DIGITAL MARKETING)

Manajemen keuangan merupakan tulang punggung dari setiap organisasi atau perusahaan yang memerlukan pengelolaan sumber daya keuangan yang bijaksana, tepat dan efisien. Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, manajemen keuangan menjadi krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan (Astaginy, 2023). Tidak hanya itu, manajemen keuangan juga menjadi hal penting bagi kebutuhan personal individu, baik dari perencanaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan terkait kebutuhan primer, kebutuhan pendidikan, alokasi dana pensiun dan laporan keuangan pribadi juga menjadi hal yang tak terbantahkan bahwa manajemen keuangan diperlukan bukan hanya untuk kebutuhan *corporate*.

Seiring dengan peralihan waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, mendorong manusia untuk menyelaraskan semua ilmu pengetahuan dengan penerapan teknologi. Bila pada era modern (1900-1950) berbagai alat telah diciptakan untuk mendukung kerja manusia, maka pada era digital (1950 – sampai saat ini)

perkembangan teknologi informasi dan digital semakin maju pesat. Hal ini ditandai dengan hadirnya internet yang menghubungkan semua lini informasi secara global. Penggunaan komputer, smartphone, dan perangkat digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian aktivitas manusia. Begitupun penerapan teknologi digital dalam berbagai cabang ilmu manajemen telah banyak digunakan baik pada skala corporate maupun untuk penggunaan personal pribadi.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Teknologi Informasi (TI) menjadi kunci dalam merekonstruksi korporasi modern, khususnya manajemen keuangan. TI memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien dan memperkaya pengambilan keputusan strategis melalui data analitik yang canggih (Hindra & Ali, 2023). Teknologi informasi berbasis komputer dianggap salah satu yang paling berpengaruh dalam kegiatan organisasi atau individu karena data dan informasi dapat disajikan secara akurat, detail dan *real time* (Andriana et al., 2020). Teknologi informasi ini juga diterapkan dalam melihat, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kinerja keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang terkomputerisasi memudahkan dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat (Lisandra & Suwandi, 2023).

Pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi digital semakin menjadi pilihan populer di era modern ini, baik untuk individu maupun bisnis. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan pengguna untuk mengakses

rekening mereka secara online, melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan melacak pengeluaran tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik. Selain itu, aplikasi manajemen keuangan pribadi seperti Money Lover atau Mint dapat membantu pengguna merencanakan anggaran, memantau pengeluaran, dan menabung untuk tujuan tertentu. Di sisi bisnis, platform akuntansi berbasis cloud seperti Xero dan QuickBooks menawarkan solusi untuk mengelola pembukuan, mengotomatisasi faktur, serta melacak inventaris secara efisien. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses keuangan tetapi juga meningkatkan keamanan dan akurasi data keuangan.

Financial Technology

Bank Indonesia mengartikan *Financial Technology (Fintech)* sebagai gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang mana metode transaksi keuangan bentuk konvensional berubah menjadi modern. Bila dulu pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, saat ini transaksi jarak jauh dan dalam hitungan menit dapat terlaksana. *Fintech* hadir seiring dengan perubahan hidup masyarakat yang didominasi dengan pengguna teknologi informasi yang membutuhkan aksesibilitas cepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeskripsikan Fintech sebagai inovasi pada industri jasa keuangan dengan menggunakan keunggulan teknologi yang mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, berbelanja, dan menggunakan jasa keuangan lainnya.

Ruang lingkup penyelenggaraan Fintech terbagi dalam 5 kategori (Dr. Hakim, Lukmanul., S.H. & Recca Ayu Hapsari., S.H., 2022) yaitu :

1. Sistem Pembayaran (Digital Payment). Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh pada kategori system pembayaran antara lain penggunaan blockhain atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet eletronik dan mobile payment. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi fitur kemudahan transaksi antara konsumen dan pemilik usaha. Contoh : OVO, Gopay, DANA, Shopeepay
2. Pendukung Pasar. Pendukung pasar adalah Fintech yang menggunakan TI untuk memfasilitasi penggunaan produk/layanan keuangan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan ke masyarakat berupa informasi kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana premi asuransi dan sebagainya.
3. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko. Bentuk penyediaan produk investasi online seperti : Ajaib, Bibit Bareksa. Adapun contoh asuransi online (Insurtech) seperti :Qoala
4. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal. Model penyelenggaraan Fintech pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*) dan penyediaan modal(capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis TI (*peer to peer landing*) contohnya :Investree,Koinworks. serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis TI (*crowdfunding*) contohnya : Kitabisa, Kickstarter

Manfaat Fintech

Perkembangan penggunaan Fintech membawa dampak positif bagi penggunaanya, yaitu :

1. Memudahkan Transaksi Keuangan. Layanan keuangan akan lebih mudah dan cepat karena berbasis internet, pengguna tidak harus ke bank atau ke ATM untuk bertransaksi, cukup menggunakan platform digital maka transaksi pun dapat dilakukan.
2. Akses Pendanaan yang Lebih Baik. Berkat adanya *fintech* masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik. Mereka dapat mengajukan pinjaman tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit, sistem pembayaran yang praktis dan bunga yang rendah.
3. Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih baik dalam pendanaan dan pinjaman modal usaha yang difasilitasi oleh *fintech*, diharapkan dapat meningkatkan potensi usaha/bisnis, yang pelan-pelan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Memudahkan Inklusi Keuangan. Manfaat lain dari penerapan fintech yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan dapat terjadi karena tersedianya layanan keuangan secara aman, nyaman, dan terjangkau bagi siapapun.

Kelemahan Fintech

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan fintech juga di sisi lain memberikan kelemahan (Sudirman & Disemadi, 2022), yaitu :

1. Risiko Keamanan Data dan Privasi. Fintech beroperasi secara digital yang menggunakan basis data pelanggan atau

konsumen, maka pencurian data dan transaksi tidak sah dapat terjadi ketika informasi pribadi dan finansial diakses oleh pihak tidak berwenang.

2. Regulasi yang Belum Matang. Banyak negara yang belum mengembangkan *fintech* dengan baik, hal ini dikarenakan keterbatasan akses informasi dan teknologi. Belum lagi tidak adanya undang-undang yang secara eksplisit mengatur terkait pelanggaran penggunaan data pengguna.
3. Risiko Teknologi. Ketergantungan pada teknologi membuat *fintech* rentan terhadap gangguan teknis seperti server yang *down*, *bug* dalam aplikasi dan kegagalan system. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna, bahkan dapat menimbulkan resiko finansial.
4. Minimnya Literasi Keuangan Digital. Banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan kemudahan akses layanan *fintech* seperti aplikasi pinjaman online, tanpa memperhitungkan bunga yang tinggi.
5. Risiko Penipuan (*Fraud*). Sejak adanya teknologi informasi telah marak penipuan. Bila dulunya penipuan sebatas pada pesan-pesan tidak resmi yang masuk pada telpon seluler, saat ini penipuan berkedok platform investasi palsu banyak terjadi.

Digital Marketing

Pemasaran digital telah mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun ini. Hal ini didorong oleh berkembangnya teknologi informasi yang merubah semua aktivitas kegiatan yang dahulunya serba manual menjadi terkomputerisasi dan digital, ditambah dengan peningkatan akses penggunaan internet dan perangkat mobile yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja. Termasuk dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, pun dalam kegiatan pemasaran. Digital marketing merupakan salah satu kategori dalam dunia pemasaran yang berguna dalam mengiklankan suatu produk atau layanan untuk menjangkau calon pembeli melalui media digital sebagai sarana komunikasinya .

(Saputra & Ardani, 2020) menyatakan digital marketing memanfaatkan berbagai media yang terhubung dengan internet untuk menginformasikan produk atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal luas oleh masyarakat atau konsumen. Dilansir dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 bahwa tingkat pengguna internet di Indonesia menyentuh angka 79,5 % dari total 278.696.200 jiwa jumlah populasi penduduk Indonesia. Hal ini semakin memperbesar peluang dunia usaha atau bisnis untuk mengembangkan pemasarannya melalui digital marketing.

Peran Media Sosial, E-Commerce dan Marketplace

Hadirnya media sosial, telah menjadi bagian atau alat yang berpengaruh dalam strategi digital marketing. Media sosial

memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat dan efisien. Dengan platform seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Twitter, perusahaan dapat membagikan konten yang menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran merek. Penggunaan hashtag dan fitur berbagi juga membantu dalam memperluas jangkauan konten. Bila sebelumnya media sosial hanya berfokus pada interaksi pengguna dalam membagikan kegiatan dan kesehariannya agar dapat dilihat oleh publik, saat ini media sosial telah beralih fungsi. Kegiatan memperkenalkan, memasarkan, mengiklankan suatu produk atau layanan juga dapat dilakukan pada media sosial.

Adapun *e-commerce* yang juga merupakan bagian dari digital marketing diartikan sebagai aktivitas jual beli barang atau jasa melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi, dengan memanfaatkan teknologi internet. E-commerce adalah platform atau situs yang dimiliki oleh satu entitas (individu atau perusahaan) untuk menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Dalam *e-commerce*, transaksi dapat mencakup berbagai bentuk interaksi, seperti pembayaran elektronik, pemasaran digital, hingga pengelolaan inventaris secara online. Contoh e-commerce : Ikea.com, Zara.com , JD.ID, Netflix, Spotify, Zalora

Marketplace telah menjadi pilar utama dalam ekonomi digital dengan menyediakan solusi yang praktis bagi penjual dan pembeli. Dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan konsumen, *marketplace* diharapkan semakin adaptif dan inovatif, menciptakan

pengalaman belanja yang lebih baik bagi semua pihak. *E-commerce* dan *marketplace* sering dianggap serupa karena sama-sama berbasis digital untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, model bisnis, dan fungsi. Marketplace adalah platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat. Platform ini bertindak sebagai perantara tanpa memiliki barang atau jasa yang dijual. Contoh *marketplace*: Tokopedia, Shopee, Lazada

Kolaborasi antara media sosial, *e-commerce*, *marketplace* dan *financial technology* membuat pengalaman belanja yang lebih lancar, mudah, dan murah. Hal ini juga mendorong inklusi keuangan lebih meningkat. *E-commerce* dan *marketplace* sering bekerja sama dengan *fintech* untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran digital seperti menyediakan e-wallet untuk memudahkan transaksi (Shopeepay, Gopay, OVO). Juga menyediakan transfer bank otomatis (*virtual account* dan *mobile banking*). Selain itu *fintech* menyediakan opsi pembayaran fleksibel bagi pelanggan *e-commerce* dan *marketplace*, seperti pay later (bayar nanti) atau cicilan tanpa kartu kredit

Hubungan antara *e-commerce*, *marketplace*, dan *fintech* bersifat saling melengkapi. *E-commerce* dan *marketplace* membutuhkan *fintech* untuk menyediakan infrastruktur pembayaran, pembiayaan, dan keamanan. Sebaliknya, *fintech* memanfaatkan ekosistem ini untuk memperluas layanan mereka kepada lebih banyak pengguna.

Kombinasi ini menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi digital dan mendukung inklusi keuangan secara global.

B. ISU KEAMANAN DAN PERLIDUNGAN DATA DALAM SISTEM KEUANGAN

Isu keamanan dan perlindungan data dalam sistem keuangan merupakan salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan internet untuk melakukan transaksi keuangan, risiko terhadap pelanggaran data semakin meningkat. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik bagi individu maupun institusi, serta merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan autentikasi multi-faktor, untuk melindungi informasi sensitif. Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang praktik keamanan siber yang baik juga penting untuk mencegah penipuan. Regulasi yang ketat dari pemerintah dan badan pengawas juga diperlukan untuk memastikan bahwa standar keamanan diterapkan secara konsisten di seluruh sektor keuangan.

Untuk mencapai tujuan ini, edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber harus diberikan kepada semua individu yang terlibat, mulai dari para pegawai hingga pengguna akhir. Kesadaran akan risiko dan potensi ancaman dapat meningkatkan kepatuhan terhadap praktik keamanan terbaik. Selain itu, pengembangan regulasi yang tegas namun fleksibel juga sangat penting untuk

memastikan semua pihak mematuhi standar yang berlaku tanpa menghambat inovasi. Regulasi ini harus dirancang untuk menanggapi perkembangan teknologi dan ancaman baru yang mungkin muncul di masa depan. Kolaborasi internasional juga tidak boleh diabaikan dalam upaya menjaga keamanan informasi pribadi. Ancaman siber sering kali melintasi batas negara, sehingga kerjasama lintas batas dapat memperkuat strategi pertahanan dan penegakan hukum. Dengan demikian, melalui sinergi antara teknologi, kebijakan, dan pendidikan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan menjaga kepercayaan publik dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

C. DAMPAK KRISIS EKONOMI PADA INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL

Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara atau wilayah mengalami gangguan signifikan yang menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi. Krisis ini ditandai oleh berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat pengangguran, inflasi atau deflasi yang tidak terkendali, serta kebangkrutan massal di sektor bisnis dan keuangan. Krisis ekonomi yang terjadi juga merambat pada terganggunya kegiatan perekonomian termasuk institusi keuangan dan pasar modal.

Untuk dapat menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi, maka perlu belajar dari kasus beberapa krisis yang pernah terjadi untuk menyiapkan mitigasi atau penanggulangan krisis. Krisis ekonomi

yang terjadi di beberapa negara akan merambat ke negara lain dan mempengaruhi kondisi ekonomi dan aktivitas keuangan termasuk Indonesia. Beberapa kasus krisis tersebut di antaranya :

1. Krisis Moneter Asia (1997 - 1998)

Pasar saham di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, mengalami penurunan tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh lebih dari 50% dari puncaknya, mencerminkan anjloknya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Banyak emiten kesulitan membayar utang luar negeri karena depresiasi nilai tukar rupiah. Dampak atas krisis tersebut mengakibatkan banyak perusahaan besar yang terdaftar di bursa efek harus menghentikan operasinya karena gagal bayar utang dalam mata uang asing. Diikuti pula dengan investor asing melakukan aksi jual besar-besaran, memperburuk depresiasi mata uang lokal dan mempercepat penurunan harga saham.

2. Krisis Dotcom (2000 - 2002)

Pasar modal AS, khususnya di sektor teknologi, mengalami gelembung (*bubble*) setelah lonjakan investasi besar-besaran dalam perusahaan internet. Indeks Nasdaq Composite, yang berfokus pada sektor teknologi, mencapai puncaknya pada tahun 2000 sebelum jatuh lebih dari 75% dalam dua tahun berikutnya. Dampak atas krisis ini menyebabkan ribuan perusahaan teknologi mengalami kebangkrutan karena tidak mampu menghasilkan keuntungan yang dijanjikan, sehingga investor

ritel dan institusi mengalami kerugian besar akibat jatuhnya harga saham.

3. **Krisis Keuangan Global (2008)**

Krisis ini dipicu oleh runtuhnya pasar subprime mortgage di AS, yang menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Pasar saham global, termasuk **Dow Jones Industrial Average (DJIA)**, **FTSE 100**, dan **IHSG**, mengalami penurunan tajam. Di Indonesia, IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 50% dari puncaknya pada tahun 2008. Atas krisis ini berdampak pada investor kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan, sehingga terjadi aksi jual besar-besaran di pasar modal. Likuiditas pasar ikut menurun drastis, dan banyak perusahaan mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan melalui pasar modal

4. **Krisis Utang Eropa (2010 - 2012)**

Krisis ini bermula dari ketidakmampuan Yunani untuk membayar utang pemerintahnya, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol. Pasar saham Eropa mengalami volatilitas tinggi, dengan indeks utama seperti **FTSE MIB (Italia)** dan **IBEX 35 (Spanyol)** turun tajam. Hal ini berdampak banyak investor global menarik modal dari pasar saham Eropa, menyebabkan penurunan harga saham dan obligasi pemerintah. Di sisi lain pasar obligasi menghadapi lonjakan imbal hasil karena kekhawatiran gagal bayar utang oleh pemerintah beberapa negara

5. **Pandemi Covid-19 (2020)**

Awal pandemi COVID-19 memicu kepanikan di pasar modal global. Indeks utama seperti **S&P 500**, **Dow Jones**, **FTSE 100**, dan **IHSG** turun lebih dari 30% dalam waktu beberapa minggu. Banyak perusahaan yang terdaftar di bursa efek, terutama di sektor penerbangan, pariwisata, dan perhotelan, mengalami penurunan tajam dalam pendapatan. Dampak atas pandemi ini terjadi volatilitas tinggi di pasar modal, dengan aksi jual besar-besaran oleh investor institusi dan ritel. Beberapa bursa saham mengaktifkan mekanisme *circuit breaker* untuk menghentikan perdagangan sementara guna mengurangi kepanikan.

6. Kasus Evergrande dan Krisis Properti Tiongkok (2021-2023)

China Evergrande Group, salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok, mengalami gagal bayar utang, memicu kekhawatiran akan krisis di sektor properti. Bursa saham di Tiongkok dan negara-negara lain yang terkait dengan rantai pasok properti Tiongkok mengalami tekanan besar. Hal ini berdampak pada harga saham perusahaan properti Tiongkok dan sektor terkait (bahan bangunan, konstruksi) anjlok. Kekhawatiran terhadap dampak sistemik menyebar ke pasar modal global, meskipun dampaknya lebih terkendali dibandingkan krisis sebelumnya

Ketika krisis ekonomi terjadi, institusi keuangan menghadapi tekanan besar yang dapat mengancam stabilitasnya. Untuk menghadapi situasi ini, institusi keuangan perlu mengambil langkah-langkah strategis yang fokus pada pengelolaan risiko, likuiditas, dan

kepercayaan nasabah. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:

1. Memastikan Likuiditas Memadai

Tujuan dari hal ini untuk mencegah kebangkrutan akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban pendeknya. Langkah yang diambil berupa mempertahankan cadangan kas ketika terjadi penarikan dana oleh nasabah secara serentak dan menyeluruh. Selain itu perusahaan dapat memanfaatkan pinjaman dari bank sentral atau institusi lain untuk mempertahankan likuiditas.

2. Memantau dan Mengelola Risiko Kredit

Dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi portofolio kredit, memantau sektor atau debitur yang berpotensi gagal bayar. Di sisi lain langkah memberikan opsi kelonggaran pembayaran pada debitur yang terdampak krisis juga dapat membantu menurunkan risiko kredit. Termasuk meningkatkan dana cadangan untuk mengantisipasi kredit yang bermasalah.

3. Mempertahankan Kepercayaan Nasabah

Untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan mencegah penarikan dana besar-besaran maka hal yang dapat dilakukan dengan memberikan informasi terbuka terkait upaya perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangannya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan merespons keluhan dan kebutuhan nasabah dengan cepat untuk menghindari *panic withdrawal*

4. Mengelola Risiko Pasar

Tujuan dari mengelola risiko pasar yaitu mengurangi kerugian akibat volatilitas pasar modal dan nilai tukar. Dengan cara mengurangi eksposur pada aset berisiko tinggi, menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi nilai aset terhadap fluktuasi pasar dan mengelola risiko nilai tukar jika institusi memiliki eksposur internasional.

5. Berkolaborasi dengan Otoritas Regulasi

Tujuan dari upaya ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara mematuhi kebijakan moneter seperti pelonggaran suku bunga atau program stimulus, memanfaatkan bantuan pemerintah atau program stabilisasi ekonomi jika diperlukan serta memberikan data yang relevan kepada regulator untuk mencegah risiko yang lebih besar

6. Memperkuat Struktur Organisasi Internal

beberapa langkah untuk memperkuat struktur internal organisasi yaitu dengan mengurangi biaya operasional yang tidak esensial, memperbarui strategi manajemen risiko berdasarkan kondisi terkini, dan meningkatkan kemampuan staf untuk menangani krisis, termasuk manajemen nasabah dalam situasi kritis

7. Menjaga Stabilitas Sistem Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi harus dijaga agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah. Upaya yang dapat dilakukan dengan melindungi sistem dari potensi serangan siber, yang sering meningkat selama krisis,

memastikan layanan online tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan nasabah serta memberikan akses mudah kepada nasabah untuk transaksi non-tunai.

8. Melakukan Inovasi Diversifikasi Layanan

Pengembangan inovasi dan diversifikasi layanan bertujuan untuk mempertahankan daya saing selama krisis. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menawarkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan krisis, seperti pinjaman mikro atau paket investasi aman, dan mempercepat transformasi digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah.

Selain institusi keuangan, pasar modal juga terkena dampak atas terjadinya krisis ekonomi yang melanda. Volatilitas tinggi, penurunan harga aset dan kepanikan investor dapat memperluas ketidakstabilan pasar modal. Untuk menghadapi situasi ini, pasar modal perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola risiko, memulihkan kepercayaan investor, dan menjaga kelangsungan operasional. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menjaga Stabilitas dan Likuiditas Pasar

Untuk mengurangi volatilitas ekstrem dan menjaga fungsi pasar maka cara yang dapat ditempuh yaitu otoritas pasar modal dapat membeli saham atau obligasi untuk menstabilkan harga dan mencegah penurunan drastis, mengaktifkan mekanisme *circuit breaker* untuk menghentikan perdagangan sementara jika terjadi penurunan indeks yang tajam serta menyediakan fasilitas

likuiditas kepada pelaku pasar yang menghadapi tekanan keuangan

2. Memperkuat Kepercayaan Investor

Agar investor dapat percaya, hal yang dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi pasar dan langkah mitigasi yang diambil, mengedukasi investor untuk menghindari keputusan berbasis panik dan memahami risiko investasi. Jika diperlukan, bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap investasi tertentu

3. Mengelola Risiko Sistemik

Pengelolaan risiko sistemik bertujuan mencegah penyebaran risiko yang dapat mengancam stabilitas pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau aktivitas pelaku pasar, termasuk *short selling* yang dapat memperburuk krisis. Juga menilai kondisi keuangan perusahaan yang terdaftar untuk mengidentifikasi risiko kebangkrutan dan melarang sementara aktivitas seperti *naked short selling* yang dapat memperburuk penurunan harga asset.

4. Mempercepat Proses Restrukturisasi Aset

Langkah yang dilakukan dengan Mendorong emiten untuk merestrukturisasi obligasi yang mendekati jatuh tempo agar tidak mengalami gagal bayar. Selain itu menunda peluncuran saham atau obligasi baru hingga kondisi pasar lebih stabil. Juga Memberikan panduan kepada manajer investasi untuk merestrukturisasi portofolio guna meminimalkan kerugian

5. Meningkatkan Kolaborasi dengan Otoritas Terkait

Cara yang dilakukan dengan memastikan kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga, sejalan dengan kebutuhan pasar modal, mengusulkan kebijakan stimulus fiskal yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar, dan berkolaborasi dengan pasar modal global untuk mengantisipasi risiko yang bersifat lintas negara

6. Memperkuat Infrastruktur Pasar

Untuk memperkuat infrastruktur pasar harus Memastikan platform perdagangan elektronik dapat menangani lonjakan volume perdagangan. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu Melindungi sistem dari potensi serangan siber yang dapat memperburuk krisis, juga memastikan bahwa lembaga seperti bursa efek, lembaga kliring, dan kustodian dapat beroperasi secara optimal

7. Memberikan Stimulus pada Emiten

Stimulus kepada emiten dapat dilakukan dengan cara Mengurangi biaya pencatatan, pelaporan, dan regulasi untuk meringankan beban emiten, Membuka akses ke program pembiayaan darurat bagi emiten yang mengalami kesulitan keuangan serta Mendorong perusahaan untuk membeli kembali saham mereka guna menstabilkan harga di pasar

8. Meningkatkan Edukasi dan Literasi Pasar

Meningkatkan edukasi dan literasi dapat mengurangi perilaku panik di kalangan investor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan edukasi kepada investor tentang cara menghadapi volatilitas pasar, memberikan laporan reguler tentang situasi

pasar dan prospek pemulihan ekonomi, dan mengarahkan investor untuk fokus pada keuntungan jangka panjang daripada merespons gejolak jangka pendek

D. REGULASI DAN KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PASAR MODAL

Regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan pasar modal bertujuan untuk memastikan stabilitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan oleh individu, perusahaan, atau negara. Regulasi ini mencakup aturan yang diterapkan oleh pemerintah, bank sentral, dan lembaga pengawas untuk mengatur aktivitas keuangan dan pasar modal.

Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya melindungi ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat dalam sistem keuangan. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperbarui dan memperkuat kerangka regulasi yang ada. Beberapa regulasi yang penting diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dan pasar modal yaitu :

1. Regulasi Perbankan

Regulasi perbankan dirancang untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan melindungi nasabah. Bank diwajibkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap calon debitur untuk meminimalkan risiko gagal bayar serta memastikan bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban

jangka pendeknya. Di sisi lain Bank harus mematuhi aturan yang mewajibkan mereka memiliki modal minimum tertentu untuk mengantisipasi risiko.

2. Regulasi Pasar Modal

Pasar modal diatur untuk melindungi investor dan memastikan integritas pasar. Emiten diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Melarang praktik seperti insider trading dan *pump and dump*. Selain itu Otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia harus mengawasi aktivitas di pasar modal untuk mencegah penyalahgunaan

3. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola anggaran negara untuk mempengaruhi perekonomian dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cara yang dilakukan dengan metode ekspansif (meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi) atau menggunakan metode kontraktif (Pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak untuk mengendalikan inflasi)

4. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola suplai uang dan tingkat suku bunga. Instrumen yang digunakan yaitu : Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) yang mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengontrol likuiditas; Pengaturan Suku Bunga,

yaitu bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang memengaruhi suku bunga pinjaman; Cadangan Wajib Minimum yaitu Bank diwajibkan menyimpan sebagian dana mereka di bank sentral.

5. Regulasi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Regulasi ini bertujuan memastikan perusahaan dikelola dengan baik untuk melindungi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip utama dari *Corporate Governance* ini adalah transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab sosial

Manfaat dari adanya regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pasar modal yaitu : dapat mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian ; melindungi hak-hak individu dan institusi yang berpartisipasi di pasar keuangan ; memastikan informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan dapat dipercaya ; mendukung pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pasar modal ini tentu tidak selamanya berjalan mulus. Tentu ada tantangan yang tak dapat dielakkan seperti : tidak semua institusi mampu mematuhi regulasi dengan baik karena kendala biaya atau keterbatasan ; pasar global yang semakin kompleks membutuhkan regulasi yang adaptif ; koordinasi antarnegara menjadi penting, terutama dalam menghadapi tantangan lintas batas seperti pencucian uang atau krisis keuangan global ; Kemunculan teknologi baru seperti kripto dan fintech memerlukan regulasi baru yang relevan.

Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan transparan. Pemerintah, otoritas pengawas, dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi diterapkan secara efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi

E. PERAN INVESTASI BERKELANJUTAN DAN PASAR MODAL HIJAU

Invesatasi Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan atau *sustainable investing* adalah strategi investasi yang mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Tujuannya adalah menghasilkan keuntungan jangka panjang yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan sosial.

Terdapat 3 elemen utama, yaitu :

1. *Environmental* (Lingkungan). Berfokus pada dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan seperti pengelolaan emisi karbon, konservasi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
2. *Social* (Sosial). Berfokus pada cara perusahaan memperlakukan karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi kerja yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, inklusi sosial, dan kontribusi terhadap masyarakat.

3. *Governance* (Tata Kelola). Hal ini terkait penilaian terhadap tata kelola perusahaan, seperti : Transparansi, akuntabilitas, komposisi dewan direksi, kebijakan anti-korupsi, dan perlindungan terhadap hak pemegang saham

Investasi berkelanjutan harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Peran pemerintah, investor, dan pelaku usaha harus selalu bersinergi untuk menciptakan hal tersebut agar dampak positif jangka panjang dapat terpenuhi. Beberapa alasan pentingnya investasi berkelanjutan yaitu :

1. Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi. dibutuhkan pengelolaan risiko jangka panjang karena perubahan iklim, bencana lingkungan, dan masalah sosial dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global. Investasi berkelanjutan membantu memitigasi risiko ini dengan mendukung bisnis yang proaktif dalam menghadapi tantangan. Perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan cenderung lebih stabil karena mereka fokus pada efisiensi, inovasi, dan manajemen risiko yang baik.
2. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. Investasi berkelanjutan mendukung upaya global untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi karbon. Dengan mendanai energi terbarukan, transportasi rendah karbon, dan teknologi hijau, investasi ini berkontribusi pada transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
3. Menarik Investor Baru. Generasi muda lebih peduli pada keberlanjutan dan cenderung memilih produk investasi yang

mencerminkan nilai-nilai mereka. Hal ini menciptakan permintaan baru untuk produk investasi berkelanjutan, missal : generasi millennial dan Gen Z.

4. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan. Bisnis yang mendukung keberlanjutan sering kali mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, investor yang berfokus pada keberlanjutan dilihat sebagai pihak yang bertanggung jawab dan peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan.
5. Mendorong Inovasi. Investasi berkelanjutan memacu pengembangan teknologi baru yang dapat mengatasi tantangan lingkungan dan sosial, seperti teknologi karbon rendah, solusi daur ulang, dan sistem pertanian cerdas

Investasi berkelanjutan bukan hanya langkah menuju tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. Dengan memperhatikan keberlanjutan, investor dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih adil, ramah lingkungan, dan makmur, sambil tetap meraih peluang keuntungan jangka panjang.

Pasar Modal Hijau

Pasar modal hijau adalah bagian dari pasar modal yang berfokus pada pembiayaan dan investasi dalam proyek, perusahaan, atau inisiatif yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan sumber

pendanaan bagi proyek-proyek yang ramah lingkungan. Karakteristik dari pasar modal hijau adalah :

1. Instrumen Keuangan Ramah Lingkungan. Hal ini ditandai dengan obligasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, atau transportasi rendah karbon, biasa diistilahkan *Green Bonds*. Lalu saham perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan atau disebut *Green Equity*. Kemudian dana investasi yang digunakan secara khusus ditujukan untuk mendukung proyek atau perusahaan hijau atau disebut *Green Funds*.
2. Fokus pada ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Pasar modal hijau sering kali melibatkan penilaian faktor ESG untuk memastikan investasi berdampak positif terhadap lingkungan, mendukung kesejahteraan sosial, dan mengikuti tata kelola yang baik.
3. Sertifikasi dan Standar. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, instrumen hijau biasanya mematuhi standar internasional seperti *Green Bond Principles* (GBP) atau Climate Bonds Standard.

Manfaat dari adanya pasar modal hijau ini yaitu :

1. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Mendorong investasi dalam proyek-proyek yang membantu mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan melindungi ekosistem.

2. Akses Pendanaan Baru. Memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan fokus keberlanjutan.
3. Investor Lebih Bertanggung Jawab. Menarik investor yang memiliki kepedulian terhadap dampak lingkungan dan sosial dari investasinya.
4. Pengelolaan Risiko Lingkungan. Membantu perusahaan dan pemerintah mengatasi risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan regulasi lingkungan

Pasar modal hijau merupakan langkah penting untuk memobilisasi pendanaan yang mendukung agenda global seperti *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Contoh implementasi pasar modal hijau, diantaranya : 1) Pemerintah dan perusahaan di berbagai negara menerbitkan obligasi hijau untuk membiayai proyek energi terbarukan atau transportasi rendah karbon. 2) Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memfasilitasi penerbitan instrumen berbasis keberlanjutan, seperti green sukuk (sukuk hijau), sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. M., & Fuchs, J. D. (2004). *Financial Institutions and Markets: The Canadian Experience*. McGraw-Hill.
- Allen, F., & Santomero, A. M. (1998). The Theory of Financial Intermediation. *Journal of Banking and Finance*.
- Andriana, M., Sumarlin, T., & Panjaitan, R. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kinerja Manajerial Keuangan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.127>
- Ang, A., & Liu, J. (2017). *Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing*. Oxford University Press.
- Anthony Saunders, M. M. C. (2023). *Principles of Financial Markets and Institutions* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Anthony Saunders. (2021). *Financial Markets and Institutions: A Managerial Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Astaginy, N. (2023). *Buku Ajar Manajemen Keuangan* (A. Rundu Wonua (ed.); 1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- B., M. L. T. (2023). *Introduction to Financial Markets and Institutions*. Wiley.
- Bartleman, J. W., & Cox, D. W. (2020). *Financial Institutions and Markets: A Global Perspective*. Wiley.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence. *Journal of Economic Growth*.

- Benston, G. J., & Smith, C. W. (1976). A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation. *Journal of Finance*.
- Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2013). How Does Capital Affect Bank Performance During Financial Crises?. *Journal of Financial Economics*.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The Economics of Small Business Finance: The Role of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle. *Journal of Banking & Finance*.
- Berk, J., & DeMarzo, P. (2017). *Corporate Finance*. Pearson Education.
- Bhole, L. M., & Mahakud, J. (2020). *Financial Institutions and Markets* (4th ed.). Tata MccGraw-Hill Education.
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*.
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*.
- Blackwell, D. (2007). *Financial Institutions and Markets: The Canadian Experience*. McGraw-Hill.
- Bodie, Zvi., Kane, Alex., & Marcus, Alan J. (2014). *Investments*. 10th Edition. McGraw-Hill Education.
- Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan. 2008. *Investments*; USA: McGraw Hill.
- Boot, A. W. A., & Thakor, A. V. (1997). Financial System Architecture and the Role of Banks. In: *The Theory of Financial Intermediation: Theories and Policies*. Springer.
- Brealey, R., & Myers, S. C. (2013). *Principles of Corporate Finance*. 11th Edition. McGraw-Hill.

- Burgess, R., & Pande, R. (2005). Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. *American Economic Review*.
- Calomiris, C. W., & Kahn, C. M. (1991). The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Banking Arrangements. *American Economic Review*.
- Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2020). *Financial Institutions, Markets, and Money*. McGraw-Hill Education.
- Chiesa, G., & Fattore, G. (2022). *Handbook of Financial Institutions and Markets*. wil.
- Cressy, R., & Toledano, N. (2000). *The Economics of Banking: Theory, Evidence and Policy*. Wiley.
- Cumming, D. J., & Hoon, H. (2005). Private Equity: History, Evolution and Current Issues. *Journal of Applied Corporate Finance*.
- Diamond, D. W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *Review of Economic Studies*.
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*.
- Dr.Hakim, Lukmanul ., S.H., M. ., & Recca Ayu Hapsari, S.H., M. . (2022). *Buku Ajar Hukum Teknologi Keuangan LAW*. In Adanu Abimata (Issue 0).
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (2003). *Financial Markets and Institutions*. Pearson Prentice Hall.
- Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Ferri, M. G. (2021). *Foundations of Financial Markets and Institutions* (5th ed.). MIT Press.
- Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Ferri, M. G. (2022). *Foundations of Financial Markets and Institutions* (6th ed.). MIT Press.

- Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Ferri, M. G. (2023). *Foundations of Financial Markets and Institutions* (7th ed.). MIT Press.
- Fabozzi, F. J., Modigliani, F., Ferri, M. G., & Tuckman, W. L. J. (2020). *Foundations of Global Financial Markets and Institutions* (5th ed.). MIT Press.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427-465.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2010). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*.
- Fama, E. 1970. Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance* 25, No 2:383-417
- Ghosh, D., & Mollah, M. (2015). *Essentials of Bank Management*. Springer.
- Goodhart, C. A. E. (2004). *The Unfinished Basel III Framework*. Financial Markets Group.
- Gorton, G. B. (2010). *Slapped by the Invisible Hand: The Panic of 2007*. Oxford University Press.
- Greenbaum, S. I., & Thakor, A. V. (1995). *Banking Theory and Practice*. Prentice Hall.
- Greenbaum, S. I., & Thakor, A. V. (2007). *Contemporary Financial Intermediation*. Elsevier.
- Hall, R. E. (1982). The Importance of the Financial System: A New Approach. *Journal of Economic Perspectives*.
- Hall, R. E. (1983). The Relation between Price and Income Expectations in the Stock Market. *Journal of Political Economy*.

- Hargraves, D., & Slater, D. (2006). *Principles of Banking: A Complete Guide to the Regulatory and Practical Framework of Banking*. FT Prentice Hall.
- Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.
- Hindra, F., & Ali, H. (2023). Peran Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Dan Komunikasi Terhadap Implementasi Enterprise Information System (EIS). *Jemsi*, 5(1), 18–27. <https://dinastirev.org/DOI:https://doi.org/10.31933/jemsi.https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Hull, J. C. (2014). *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley.
- Indonesia Stock Exchange (IDX). (2020). *Annual Report 2020*. Retrieved from www.idx.co.id.
- Jones, Charles P. 2014. *INESTMENT: Principles and Concept*; John Wiley dan Sons.
- Keeley, M. C. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Harcourt Brace.
- Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. *Journal of Political Economy*.
- Koller, G., & Goedhart, M. (2005). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*. Wiley Finance.
- Lakhani, D. S. (2020). *Introduction to Financial Markets and Institutions*. Sage Publications.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2022). *Pengantar Pasar Modal dan Instrumennya*. LPS Publication.

- Lerner, J., & Tufano, P. (2011). The Consequences of Financial Innovation: A Counterfactual Research Agenda. In: Handbook of the Economics of Finance. Elsevier.
- Levine, R. (2004). Finance and Growth: Theory and Evidence. In: Aghion, P. and Durlauf, S. (eds.), Handbook of Economic Growth. Elsevier.
- Lisandra, T., & Suwandi, S. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan: Peran Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5401>
- Liu, J., & Wang, L. (2017). Financial Markets and Institutions. Pearson.
- Madura, J. (2011). Financial Markets and Institutions. 10th Edition. Cengage Learning.
- Madura, J. (2020). Financial Institutions and Markets (2nd ed.). Person.
- Madura, J. (2021). Global Financial Institutions and Markets (5th ed.). Routledge.
- Madura, J. (2022). Global Financial Institutions and Markets (6th ed.). Routledge.
- Merton, R. C. (1995). A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment. *Journal of Applied Corporate Finance*.
- Merton, R. C., & Bodie, Z. (1995). A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment. *Journal of Applied Corporate Finance*.
- Meyers, S., & Brealey, R. A. (2008). Principles of Corporate Finance. 8th Edition. McGraw-Hill.

- Mishkin, F. S. (2015). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2020). *Financial Markets, Institutions, and Money* (4th ed.). pearson.
- Mody, A. (2009). *International Financial Markets and the Global Economic Crisis*. Journal of Policy Modeling.
- Nellis, J. G., & Parker, D. (2006). *Public Sector Economics: Theory, Policy, and Practice*. Palgrave Macmillan.
- O'Hara, M. (1995). *Market Microstructure Theory*. Blackwell.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). *Peraturan Pasar Modal Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Laporan Tahunan OJK 2020*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Buku-1, OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan*; Jakarta, OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /POJK.04/2020, TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK*; Jakarta, OJK
- Pyles, M. (2003). *The Bank M&A Process: A Step-by-Step Guide to Merger and Acquisition Success*. Wiley.
- Radelet, S., & Sachs, J. (1998). *The Onset of the East Asian Financial Crisis*. In: *World Bank Working Papers*. World Bank.
- Rajan, R. G. (1992). *Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm's-Length Debt*. Journal of Finance.

- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). *Bank Management & Financial Services*. McGraw-Hill Education.
- Santomero, A. M. (1997). *Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process*. Wharton Financial Institutions Center.
- Saputra, G. W., & Ardani, I. G. A. K. S. (2020). Pengaruh Digital Marketing, Word of Mouth, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(7), 2596. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i07.p07>
- Saunders, A. (2000). *Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms*. Wiley.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2020). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2021). *Principles of Financial Markets and Institutions* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2022). *Principles of Financial Markets and Institutions* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Schinasi, G. J. (2004). *Financial Stability: A Monetary Analysis*. International Monetary Fund.
- Scholes, M. (2000). *The Econometrics of Financial Markets*. University of Chicago Press.
- Schumpeter, J. A. (2003). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Row.
- Sharpe, William C.; Bailey, Jeffrey W.; Alexander, Gordon J. 1998. *Investments; USA: Prentice Hall*.
- Shiller, R. J. (2000). *Irrational Exuberance*. Princeton University Press.

- Shin, H. S. (2009). Reflections on Northern Rock: The Bank Run that Heralded the Global Financial Crisis. *Journal of Economic Perspectives*.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*.
- Solow, R. M. (2000). Growth Theory and Economic Policy. *The Economic Journal*.
- Stiglitz, J. E. (1983). Information and Economic Analysis: A Perspective. *Oxford Economic Papers*.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493.
- Tan, H. B., & Toh, S. (2007). *Banking and Financial Institutions: A Global Perspective*. Pearson Education.
- Thakor, A. V. (1996). The Design of Financial Systems: Towards an Efficient and Equitable Financial System. *Journal of Financial Intermediation*.
- Tuckman, B. (2011). *Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets*. Wiley.
- Turner, A. (2016). *Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance*. Princeton University Press.
- Zingales, L. (2000). In Search of New Foundations. *Journal of Financial Economics*.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Annisa Fitri Anggraeni, SE., MM., CIISA., seorang Penulis dan Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. Lahir di Bandung, 24 Oktober 1991. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Dr. H. Deden Komar Priatna, ST., SIP, MM., CHRA dan ibu Dr. Hj. Yustina Yuliasari, S.Pdi., M.Ag. ia menamatkan pendidikan program Sarjana Akuntansi (S1) di Universitas Pendidikan Indonesia, menamatkan program Magister

Manajemen (S2) di Universitas Winaya Mukti dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Akuntansi (S3) di Universitas Padjadjaran Bandung konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi. Saat ini beliau sedang menempuh Pendidikan Doktor (S3) Kembali pada jurusan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan (2023). Penulis mendapatkan sertifikasi *Certified International Information Systems Audit* (CIISA) dari American Academy Project Management pada Tahun 2020. Penulis aktif menulis buku dan berbagai jurnal ilmiah bereputasi.

Link Research Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Annisa-Anggraeni-4>



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Tunas Pemuda, Tangerang Banten. Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang.



DR. H. Andi Rustam, SE., AK., CA., CA., Asean CPA.

Dosen Program Studi Manajemen (S1) dan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen (S2) Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketua Prodi Perpajakan FEB Universitas Muhammadiyah Makassar periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Terlahir di kota Ujung Pandang pada tanggal 09 September 1967. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Andi. Muhammad Yusuf Toaso dan Ibu Hj. Andi Sahrisiah Petta Useng. Penulis menamatkan Pendidikan program S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1992 dan menyelesaikan program pascasarjana (S2) di Magister Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun

2003 dan program pascasarjana S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2011. Penulis Menekuni bidang Auditing, Produktivitas kerja, Manajemen Keuangan, Manajemen Finansial, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Manajemen SDM

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail

Andi.rustam@unismuh.ac.id

Andirust99@gmail.com

Andrust99@yahoo.co.id

 ORCID.ID: <https://orcid.org/0009-0000-2082-4339>:

 Googlescholar ID: GGgKzyQAAAAJ:  SintaID : 6175943



Tri Kunawangsih Purnamaningrum

dilahirkan di Purwokerto tahun 1968. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S3 diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak tahun 1992 hingga sekarang menjadi dosen tetap di FEB Universitas Trisakti Jakarta. Mengajar di program S1 dan S1 Terapan, PPBP (Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan) BCA, S2, S3. Tahun 2008-2014, menjadi Direktur

di Trisakti Education and Business Institute (TRIEBI) Trisakti. Buku yang pernah diterbitkan berjudul Pengantar Ekonomi Mikro, Ekonomika Makro Sebuah Pengantar, Metode Penelitian Kuantitatif, Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi, The Journey of Pantun.



Niar Astagi ny,SE.,M.Si

Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Lahir di Kolaka, 2 Mei 1982. Lulus S2 pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin. Selain aktif mengajar, juga melakukan berbagai penelitian yang dipublish (artikel) diberbagai jurnal bereputasi. Selain itu, juga aktif menulis buku berkolaborasi dengan beberapa penulis lainnya



Google scholar.ID : mWzAqEwAAAAJ&hl=id



Sinta ID :6177080

Email : niaralfatah24@gmail.com

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com